**Strategi Lembaga Zakat dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Kota
Malang
(Studi Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kota Malang)**

Shabrinaifah Boeke Handimarsya

17801005

Jurusan Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim

Malang

2020

**Strategi Lembaga Zakat dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Kota
Malang
(Studi Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kota Malang)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Magister Ekonomi Syariah

**TESIS
OLEH:**

Shabrinaifah Boeke Handimarsya (17801005)

Jurusan Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim

Malang

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Strategi Lembaga Zakat dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Kota Malang (Studi Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kota Malang)** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 4 Desember 2020.

Dewan Penguji

Dr. Ir. H. Masyhuri Machfudz, MP. (Ketua)
NIP. 1890204024

Dr. Siswanto, M.Si. (Penguji Utama)
NIP. 19750906 200604 1 001

Dr. H. Ahmad Dialaluddin I.C., MA (Anggota)
NIP. 197307192005011003

Eko Supriatno, S.E., M.Sc., Ph.D. (Anggota)
NIP. 19751091999030103

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **Strategi Lembaga Zakat dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Kota Malang (Studi Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kota Malang)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Dialaluddin LC, MA

NIP. 197307192005011003

Pembimbing II

Eko Suprayitno, S.E., M.Sc., Ph.D.

NIP. 197511091999030103

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. H. Ahmad Dialaluddin LC, MA

NIP. 197307192005011003

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shabrinaifah Boeke Handimarsya
NIM : 17801005
Program Studi : Megister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Strategi Lembaga Zakat dalam Mengatasi Ketimpangan
Ekonomi Di Kota Malang (Studi Badan Amil Zakat
Nasional/BAZNAS Kota Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 04 Desember 2020

Hormat saya

Shabrinaifah Boeke Handimarsya

NIM 17801005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Strategi Lembaga Zakat dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Kota Malang (Studi Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kota Malang)” dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menghaturkan rasa hormat sebagai penghargaan dalam rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA selaku Ketua Prodi Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Eko Suprayitno, SE. M.Sc. P. hD. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran dan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kedua orang tua peneliti, Bapak Ery Soebandrijo & Ibu Lilies Wardhani peneliti yang senantiasa menyemangati, memotivasi, mendamping dan tiada henti mendoakan peneliti dalam proses penyelesaian tesis ini.

6. Seluruh para pengurus dan staff Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang, yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membantu proses penelitian.
7. Teruntuk Adelina Tri Vanda yang selalu mensupport peneliti dalam penyelesaian tesis ini.
8. Sahabat seperjuangan dan teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namun memberikan banyak dukungan atas penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih dapat kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan ini selanjutnya.

Akhirnya, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Malang, 4 Desember 2020

Peneliti,

Shabrinaifah Boeke H

NIM. 17801005

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Pernyataan Keaslian Tulisan	iii
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel	v
Motto.....	i
Abstrak Bahasa Indonesia.....	i
Abstrak Bahasa Inggris	i
Abstrak Bahasa Arab.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Penelitian Terdahulu	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep ZIS	11
2.2 Konsep Lembaga Pengelola ZIS	15
2.2.1 Prinsip Prinsip Pengelolaan ZIS	18
2.2.2 Sistem Pengelolaan ZIS	21
2.2.3 Penggunaan Dana ZIS.....	23
2.2.4 Konsep Pendistribusian Dana ZIS	25

2.3 Teori Ketimpangan Distribusi Pendapatan	26
2.4 Pengukuran Ketimpangan Pendapatan.....	29
1. Kurva Lorenz	29
2. Indeks Gini Rasio Gini.....	29
3. Kriteria Bank Dunia	30
2.5 Konsep Kesejahteraan.....	30
2.5.1 Indikator Kesejahteraan.....	32
2.6 Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Ketimpangan	33
2.7 Teori Manajemen Strategi.....	34
2.7.1 Jenis – jenis Strategi.....	35
2.8 Teori Manajemen Strategi Syariah.....	36
2.9 Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
3.2 Latar Penelitian	43
3.3 Sumber dan Jenis Data	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.4.1 Wawancara	47
3.4.2 Observasi	48
3.4.3 Dokumentasi.....	49
3.5 Teknik Analisis Data.....	50
3.6 Mode Validasi Data.....	53
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	56
4.1 Gambaran Umum BAZNAZ.....	56
4.2 BAZNAZ Kota Malang.....	62
4.2.1 Dasar Hukum.....	63

4.2.2 Visi dan Misi	64
4.2.3 Tujuan dan Sasaran	65
4.2.4 Program Kerja	65
4.2.5 Unit Pengumpul.....	67
4.3 Paparan Data Hasil Penelitian.....	69
4.4 Rencana Strategi BAZNAS tahun 2018-2023	75
4.5 Upaya Pemerataan Kesejahteraan	83
4.6 Temuan Penelitian.....	86
BAB V PEMBAHASAN	90
5.1 Strategi BAZNAZ dalam Ketimpangan Ekonomi	90
5.2 BAZNAZ dalam Upaya Peningkatan Ekonomi.....	106
BAB VI PENUTUP	120
Kesimpulan	120
Saran.....	121
Daftar Pustaka	123

DAFTAR GAMBAR

1.1 Rasio Gini Indonesia	3
2.1 Sistem Pengelolaan Zakat	21
2.2 Kurva Kuznet	28
2.3 Model Manajemen Strategi Syariah	37
2.4 Prosedur Pemeriksaan Tahap Pelaporan	40
3.1 Analisis Data Model Miles-Huberman	51
4.1 Penghargaan BAZNAS	61
4.2 Struktur Organisasi BAZNAS	63
5.1 Prosedur Penerimaan Zakat Payroll	103
5.2 Prosedur Penerimaan Zakat Konter	104
5.3 Prosedur Penyaluran Zakat	105

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia	2
1.2 Rasio Gini Kota-kota Di Provinsi Jawa Timur	4
1.3 Penelitian Terdahulu	8
2.1. Indikator Ketimpangan Bank Dunia	30
4.1 Penghimpunan Infaq dan Sodaqoh 1 th 2019	87
4.2 Penghimpunan Infaq dan Sodaqoh 2 th 2019	88
4.3 Penghimpunan Zakat Semester 1 2019	88
4.4 Penghimpunan Zakat Semester 2 2019	88
5.1 Penerimaan Dana ZIS	95
5.2 Bantuan Pendidikan	108
5.3 Bantuan Layanan Kesehatan	113
5.4 Bantuan Keagamaan	114
5.5 Bantuan Sarana Pendidikan	115
5.6 Mustahik Penerima Bantuan	117
5.7 Indikator Dampak Zakat	118

MOTTO

Remember, in good times and in bad, we just have to remember Him
and know that with every difficulty, there will come ease.

Have faith – and it's just a matter of time. Relief will come.

PERSEMBAHAN

Tesis ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan materi dan doa kepada seluruh teman-teman kelas A prodi ekonomi syariah angkatan 2017 yang telah memberikan dukungannya.

Sekian.

ABSTRAK

Handimarsya. 2020. Strategi Lembaga Zakat dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Kota Malang (Studi Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kota Malang) Tesis Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Ahmad Djalaludin, LC,MA. (II) Eko Suprayitno, SE, M.Sc., P.hD.

Kata Kunci; Strategi Lembaga Zakat, Zakat, Ketimpangan, Kesejahteraan, Perekonomian Kota Malang.

Pada tahun 2018, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Malang telah menyalurkan dana Zakat dari ASN (Aparatur Sipil Negara) sebesar Rp. 600 juta rupiah dan dana infaq shodaqoh sebesar 2,4 milyar kepada anak yatim, fakir miskin dan kaum dhuafa dengan jumlah total sebanyak 6000 orang. Selain itu, BAZNAS juga memberikan dana bantuan ZIS dalam bentuk bantuan wirausaha guna meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM, makanan gratis sehari 2 kali makan bagi yang layak dan juga paket berupa sembako serta BAZNAS juga menggalakkan program bedah rumah dengan jumlah 25 unit yang diperbaiki selama setahunnya. Selama bulan Ramadhan tahun 2018, BAZNAS menghimpun sekitar 750 juta dana ZIS. Dengan terkumpulnya nominal yang begitu banyak tersebut, seharusnya ketimpangan yang terjadi bisa diminimalisir dan juga dapat menurunkan besarnya angka rasio gini Kota Malang

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan keajegan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Zakat yang telah disalurkan dapat meminimalisir kemiskinan sebesar 0,016%. Meskipun tidak menurun secara signifikan, tetapi ini membuktikan bahwa adanya implikasi yang baik terhadap pengurangan jumlah rumah tangga miskin apabila ZIS dikelola dengan amanah dan profesional. Beberapa program yang telah terbentuk dan terlaksana tersebut, zakat diharapkan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan memberi manfaat terhadap mereka yang membutuhkan. Tidak hanya BAZNAS yang memiliki kewajiban untuk menggaungkan pentingnya zakat bagi peningkatan perekonomian, tetapi juga individu masing-masing, terlebih untuk mereka yang memiliki penghasilan yang sudah mencukupi nishab dalam berzakat harus memiliki kesadaran dalam mengeluarkan zakat.

ABSTRACT

Handimarsya. 2020. The Strategy of the Zakat Institution in Overcoming Economic Inequality in Malang City (Study of the National Zakat Agency / BAZNAS Malang City) Thesis of Sharia Economics Study Program, Postgraduate of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: H. Ahmad Djalaludin, LC, MA. (II) Eko Suprayitno, SE, M.Sc., P.hD.

Keywords; Zakat Institution Strategies, Zakat, Inequality, Welfare, the Economy of Malang City.

In 2018, the Malang City Amil Zakat Agency (BAZNAS) has distributed Zakat funds from ASN (State Civil Servants) of Rp. 600 million rupiah and infaq shodaqoh funds of 2.4 billion for orphans, the poor and the poor, totaling 6000 people. In addition, BAZNAS also provides ZIS assistance in the form of entrepreneurial assistance to increase the income of MSME players, free food 2 meals a day for those who are appropriate and also packages in the form of basic necessities and BAZNAS also promotes a house renovation program with a total of 25 units repaired during the year. During the month of Ramadan 2018, BAZNAS raised around 750 million ZIS funds. With the accumulation of so many nominal values, the imbalances that occur should be minimized and also be able to reduce the magnitude of the Gini ratio in Malang.

This research uses a qualitative approach with the type of case study research. Data collection was carried out by means of observation, interview and documentation techniques. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions. Meanwhile, checking the validity of the data was carried out by regular observation and triangulation.

The results showed that: Zakat that has been distributed can reduce poverty by 0.016%. Although it does not decrease significantly, this proves that there are good implications for reducing the number of poor households if ZIS is managed in a trustful and professional manner. Some of the programs that have been formed and implemented, are expected to be able to touch all levels of society and provide benefits to those in need. Not only BAZNAS who have the obligation to echo the importance of zakat for economic improvement, but also each individual, especially those who have an income that is sufficient for nishab in tithing must have awareness in paying zakat.

مجرده

هانديمارسيا. ٢,٢. استراتيجية جمعية الزكاة في التغلب على الكسح الاقتصادي في مدينة مالانج (دراسة بادان أميل زكاة ناسيونال في مدينة مالانج) بحث برنامج دراسة الاقتصادية الشرعية، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: (١) الدكتور أحمد جمال الدين، لحي، ماجستير. (٢) إيكو سوبرايتنو، ساي، مسخي، فحدي.

الكلمات الرئيسية: استراتيجية جمعية الزكاة، والزكاة، الكسح والرفاهية، واقتصادية مدينة مالانج.

هناك في عام ٢,١٨، وزعت مدينة بادان أميل زكاة (باجناس) مالانج أموال الزكاة من اسن (الجهاز المدني للدولة) بقيمة ٦.. مليون روبية وأموال الصداقة البالغة ٢,٤ مليار للأيتام والفقراء و كمثلهم ٦... اشخاص. و غير ذلك، اعطي بازناس أيضا اموال مساعدة زيس في شكل مساعدة ريادية لزيادة دخل الشركات ذات الوحدات الطبية المتوسطة، ووجبات مجانية في اليوم ٢ ووجبات للائقين وأيضا حزم في شكل بقالة، كما تشجع باجناس برنامج جراحة منزلية مع ما مجموعه ٢٥ وحدة تم إصلاحها خلال العام. خلال شهر رمضان في عام ٢,١٨، جمعت بازناس حوالي ٧٥٠ مليون من أموال جيس. مع اجتماع مثل هذا المبلغ الكبير من الاسمية، يمكن التقليل من الأهمية التي تحدث ويمكن أيضا أن تقلل من حجم نسبة جيني من مدينة مالانج.

تستخدم هذه الدراسة نهجا نوعيا مع نوع دراسة الحالة. يتم جمع البيانات من خلال تقنيات المراقبة والمقابلات والوثائق. وتشمل تقنيات تحليل البيانات الحد من البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. وفي الوقت نفسه، يتم التحقق من صحة البيانات عن طريق المراقبة والتثليث.

وأظهرت النتيجة: الزكاة التي تم توزيعها يمكن أن تقلل من الفقر بنسبة ١٦٪. ولو لم ينزل ظاهرا بل هذا برهن ان الوجود الاثر الحسن علي النقص العدد اهل المسكين ان أدار جيس أمانة و الاحترافي. بعض البرنامج جبل و امتثل ذلك. رجت الزكاة تأثر جميع الناس من كل فرقة و أعطت المنفعة لهم محتاج. انما ليس باجناس له الواجب لانتشار أهمية الزكاة لتحسين الاقتصادية بل كل جمع الناس، خصوصا له مال حسب النصاب في الزكاة له الصحو لإخراج الزكاة.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pada tahun 1960 hingga 1996, tingkat kemiskinan Indonesia menurun sangat drastis baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan beberapa program-program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan berjalan dengan efektif dan efisien. Tetapi, akibat terjadinya krisis finansial, tingkat kemiskinan di Indonesia tiba-tiba meningkat pesat dari sebelumnya, dari 11% menjadi 19,9% persen di penghujung tahun 1998.

Fenomena kemiskinan merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pasaunya, saat ini Indonesia telah masuk ke dalam golongan negara berpenghasilan menengah-bawah (*lower-middle*). Tingkat kemiskinan sudah mencapai level yang tidak wajar. Bukan hanya pada kekurangan makanan, tetapi bagi sebagian warga sudah pada tahap kehabisan bahkan tidak adanya makanan untuk dikonsumsi sehari-hari.¹ Padahal pemerintah mengklaim distribusi program Beras Sejahtera (Rastr), pada Januari, Februari, dan Maret 2019 masing-masing sebesar 99,47%, 98,8%, dan 98,5%. Selain itu realisasi anggaran bantuan sosial (bansos) hingga Maret 2019 (kuartal I-2019) telah mencapai Rp 37 triliun atau 36,2% terhadap pagu anggaran. Jumlah tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi bansos kuartal I-2018 yang hanya Rp 17,9 triliun.²

¹Mochamad Syawie. 2011. Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial. *Informasi*, Vol. 16 No. 03.

²Taufan Adharsyah. Miris, Tingkat Kemiskinan di 6 Provinsi Ini Meningkat. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190715164211-4-85070/miris-tingkat-kemiskinan-di-6-provinsi-ini-meningkat>. Di akses pada 25 September 2019.

Selain itu, pembagian dan persebaran aset negara yang tidak merata, menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi pada masyarakat. Hanya ada beberapa golongan yang bisa menikmati atau mendapatkan dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut, yaitu sebesar 20% dari masyarakat Indonesia. 40%nya lagi tidak terlalu berdampak, sedangkan sisanya tidak berdampak sama sekali, dan mereka tidak menikmati dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Kajian distribusi kekayaan negara menjadi topik yang telah diabaikan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membawa konsekuensi pada tingginya disparitas.³ Disparitas juga memberikan hambatan pada mobilitas inter regional.⁴

Tabel 1.1 Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	11.7	11.5	11.0	11.2	10.7	10.1	9.8 ¹
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	28.7	28.6	27.7	28.5	27.8	26.6	26.0 ¹
Koefisien Gini/ Rasio Gini	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39 ¹

Sumber: Badan Pusat Statistik & Bank Dunia, 2018

Badan Pusat Statistik (BPS)⁵ mencatat tingkat ketimpangan penduduk antara kalangan miskin dan kaya atau dikenal dengan istilah rasio gini di Indonesia kembali menurun ke level 0,394 pada September 2015, dari semula 0,402 pada Maret 2016. Meskipun terjadi penurunan, Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara dengan ketimpangan kekayaan tertinggi di dunia, bahkan yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara.⁶

³ Fred, Campano., and Dominick Salvatore. (2006) *Income Distribution*. London: Oxford University Press

⁴ Corak, Miles. (2011). *Income, Inequality, Equality, of Opportunity and Interregional Mobility*. Journal of Economic Perspectives. Vol 1 (1).

⁵ www.bps.go.id

⁶ https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3943747/cak-imin-ketimpangan-ekonomi-bisa-jadi-bom-waktu-konflik-sosial?_ga=2.214969943.15407440.1563161324-848699344.1527161158

Gambar 1.1 Rasio Gini Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Sebagai pulau yang memiliki penduduk terpadat di Indonesia, Pulau Jawa memberikan sumbangan rasio gini tertinggi dibanding pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia, terutama Jawa Timur. Ada beberapa kota yang rasio gininya menyentuh angka diatas rata-rata dan terus mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi pertumbuhan inflasinya sangat rendah.⁷ Hal itu disebabkan karena perputaran ekonomi yang ada di Kota Malang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat pendatang yang tidak menetap di Kota Malang. Akibatnya, ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar.

Salah satu kota di Indonesia yang memiliki rasio gini yang tinggi adalah Kota Malang yaitu sebesar 0,42%. Selain tertinggi di Jawa Timur, angka tersebut terus meningkat hingga tiga tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang ada di Kota Malang adalah sesuatu sangat perlu untuk diperhatikan.

⁷Zulfikar M S. 2014. Kaffahisme: Ideologi Ekonomi dan Bisnis Masa Depan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Gambar 1.2 Ratio Gini Kota-Kota Di Provinsi Jawa Timur

Wilayah	Gini Rasio			
	2015	2016	2017	2018
Jawa Timur	0.42	0.40	0.40	0.38
Kabupaten Pacitan	0.33	0.36	0.32	-
Kabupaten Ponorogo	0.36	0.36	0.34	-
Kabupaten Trenggalek	0.37	0.39	0.35	-
Kabupaten Tulungagung	0.36	0.37	0.35	-
Kabupaten Blitar	0.33	0.34	0.37	-
Kabupaten Kediri	0.34	0.38	0.34	-
Kabupaten Malang	0.38	0.32	0.35	-
Kabupaten Lumajang	0.29	0.35	0.31	-
Kabupaten Jember	0.33	0.31	0.34	-
Kabupaten Banyuwangi	0.34	0.33	0.34	-
Kabupaten Bondowoso	0.32	0.35	0.32	-
Kabupaten Situbondo	0.33	0.35	0.33	-
Kabupaten Probolinggo	0.30	0.31	0.36	-
Kabupaten Pasuruan	0.32	0.32	0.34	-
Kabupaten Sidoarjo	0.35	0.37	0.34	-
Kabupaten Mojokerto	0.31	0.30	0.32	-
Kabupaten Jombang	0.32	0.34	0.34	-
Kabupaten Nganjuk	0.35	0.36	0.33	-
Kabupaten Madiun	0.32	0.34	0.32	-
Kabupaten Magetan	0.34	0.37	0.39	-
Kabupaten Ngawi	0.34	0.34	0.34	-
Kabupaten Bojonegoro	0.32	0.32	0.29	-

Kabupaten Tuban	0.29	0.33	0.31	-
Kabupaten Lamongan	0.30	0.30	0.32	-
Kabupaten Gresik	0.31	0.33	0.29	-
Kabupaten Bangkalan	0.32	0.31	0.30	-
Kabupaten Sampang	0.30	0.31	0.29	-
Kabupaten Pamekasan	0.34	0.36	0.33	-
Kabupaten Sumenep	0.26	0.31	0.24	-
Kota Kediri	0.40	0.39	0.40	-
Kota Blitar	0.37	0.41	0.39	-
Kota Malang	0.38	0.41	0.42	-
Kota Probolinggo	0.36	0.31	0.37	-
Kota Pasuruan	0.39	0.40	0.38	-
Kota Mojokerto	0.36	0.37	0.39	-
Kota Madiun	0.38	0.42	0.36	-
Kota Surabaya	0.42	0.39	0.39	-
Kota Batu	0.36	0.34	0.30	-

Sumber: BPS, 2018

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dengan adanya potensi pariwisata dan industri yang mendukung serta dikenal dengan kota pendidikan. Mengembangkan aktifitas ekonomi di Kota Malang untuk mengoptimalkan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁸

Pemerintah Kota Malang sangat serius dalam menangani permasalahan kemiskinan yang ada. Dibuktikan dengan adanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang,

⁸Ratih et al. 2015. Analisis Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Malang. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang. TKPK yang di ketuai oleh Walikota Kota Malang dan yang beranggotakan OPD terkait seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan dll.

Memiliki program yang telah dibagi dalam beberapa kelompok yang pertama kelompok program *bantuan sosial terpadu berbasis individu dan keluarga*, pada tahun 2016 memiliki anggaran dana sebesar Rp 175.601.356.450.00 bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. kelompok program kedua *penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat*, memiliki dana sebesar Rp 152.761.970.130.00 bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok. Yang ketiga kelompok program *penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil*, pada tahun 2016 dana yang ada sebesar Rp. 8.784.170.600.00 bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil.

Pemerintah melalui program-programnya, juga telah memaksimalkan peran-peran industri dan UMKM yang ada untuk mengentaskan kemiskinan. Namun untuk mencapai itu, data UMKM yang baik dan benar harus betul-betul menjadi perhatian. Dengan data yang benar, maka dapat secara keseluruhan untuk mengentaskan UMKM menjadi naik kelas, dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi besar.

Selain program-program pemberantasan kemiskinan yang telah dicanangkan tersebut. Pemerintah Kota Malang tersebut, juga telah memaksimalkan fungsi ZIS (Zakat, Infaq & Shodaqoh) melalui berbagai lembaga ZIS untuk menggerakkan ekonomi negara. ZIS adalah salah satu instrument ekonomi islam yang dapat memberantas kemiskinan. Pemerintah memasukkan instrumen ekonomi islam dalam pembangunan negara karena ekonomi islam perkembangannya yang begitu pesat hingga menjadi salah satu agenda penting yang harus dibahas dalam International Monetary Fund (IMF) yang salah satunya pernah diselenggarakan di Bali pada tahun 2018 lalu.

ZIS sangat didorong perkembangannya karena mengingat mayoritas penduduk Kota Malang yang beragama muslim yaitu sebanyak 1,7 juta jiwa dari 1,9 juta jiwa total seluruh penduduk. Tujuan awal ZIS adalah menghapuskan ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat. Jika menoleh kebelakang pada sejarah Islam, awal mula ZIS bertujuan sebagai alat utama untuk mengurangi kemiskinan dan menghapus ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Pada zaman Rasulullah SAW. ZIS dikelola oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan mereka pula yang mengelola serta mendistribusikan ZIS tersebut. ZIS pada masa Khalifah juga menjadi alat ekonomi negara yang mendesak, sehingga para Khalifah, khususnya Abu Bakar memerangi orang yang enggan untuk membayar ZIS⁹

Di Indonesia sendiri, ZIS telah ada sejak zaman kolonial meskipun pengelolaannya masih belum sempurna. Baru pada masa orde baru, pemerintah mulai membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mengelola ZIS tersebut. Pada tahun 1968, Kementrian agama menerbitkan peraturan mengenai pendirian lembaga pengelolaan ZIS atau biasa disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ).

Pada tahun 2018, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Malang telah menyalurkan dana Zakat dari ASN (Aparatur Sipil Negara) sebesar Rp. 600 juta rupiah dan dana infaq shodaqoh sebesar 2,4 milyar kepada anak yatim, fakir miskin dan kaum dhuafa dengan jumlah total sebanyak 6000 orang. Selain itu, BAZNAS juga memberikan dana bantuan ZIS dalam bentuk bantuan wirausaha guna meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM, makanan gratis sehari 2 kali makan bagi yang layak dan juga paket berupa sembako serta BAZNAS juga menggalakkan program bedah rumah dengan jumlah 25 unit yang diperbaiki selama setahunnya. Selama bulan Ramadhan tahun 2018, BAZNAS menghimpun sekitar 750 juta dana ZIS. ¹⁰Dengan

⁹Luthfi Assyaukanie, Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer (Bandung, Pustaka hidayah, 1998, hlm 61.

¹⁰<https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/06/06/2018/baznas-kabupaten-malang-sudah-salurkan-rp-1-miliar/>

terkumpulnya nominal yang begitu banyak tersebut, seharusnya ketimpangan yang terjadi bisa diminimalisir dan juga dapat menurunkan besarnya angka rasio gini Kota Malang

Tetapi kenyataannya, ketimpangan yang mencolok serta penduduk miskin masih saja terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mengungkap mengapa ketimpangan masih ada di Kota Malang padahal berbagai upaya telah diperbuat oleh pemerintah kita.

b. Fokus Penelitian

Menurut dari pembahasan pada latar belakang masalah di atas maka secara umum penelitian ini ingin menjelaskan tentang strategi lembaga ZIS dengan melihat kasus, kejadian atau peristiwa, situasi, proses, program-program, dan kegiatan secara utuh, menyeluruh, dan mendalam yang ada di Badan Amil Zakat Kota Malang dalam mengatasi ketimpangan masyarakat. Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Kota Malang dalam mengatasi ketimpangan?

c. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan tentang: Strategi Badan Amil Zakat Kota Malang dalam mengatasi ketimpangan

d. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Perkembangan Pengelolaan ZIS Di Indonesia	Zusiana Elly Triantini/2010	Penelitian memiliki persamaan dalam meneliti aspek pengelolaan ZIS	Cakupan wilayah yang diteliti serta spesifikasi tujuan pengelolaan
2.	Analisis Peran ZIS dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus	Irfan Syauqi Beik/2009	Untuk mengetahui peran & dampak ZIS dalam masyarakat	Objek yang diteliti

	Dompot Dhuafa Republika			
3	Peran ZIS Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program ZIS Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)	Yoghi Citra Pratama/2015	Program manajemen ZIS dalam menanggulangi kemiskinan	Objek dan jenis ZIS yang diteliti
4	Peran Dana ZIS Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan	Nova Rini/2012	Menjelaskan peran ZIS dalam mengurangi ketimpangan	Objek yang diteliti
5	ZIS: Katup Pengaman Keseimbangan Kehidupan Ekonomi Umat	Anis Tyas Kuncoro/2017	Menjelaskan kelola ZIS secara pendekatan represif dan sistematis	Menjelaskan sistematis pengelolaan ZIS yang dikelola oleh BAZNAS
6	Pengaruh Pengelolaan ZIS Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan ZIS dan Pendayagunaan ZIS Sebagai Variabel Moderating [Studi Di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur].	Joko Hadi Purnomo/ 2018	Menjelaskan bagaimana ZIS dalam mengatasi kemiskinan	Objek dan variable yang diteliti
7	Strategi Pendistribusian ZIS Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Untuk	Yuliono/2018	Menjelaskan strategi ZIS produktif dalam meningkatkan kesejahteraan melalui	Menjelaskan strategi BAZNAS dalam mengelola ZIS secara keseluruhan

	Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Baznas Kabupaten Banyumas dan Baznas Kabupaten Purbalingga		peningkatan pendapatan usaha	dalam mengatasi ketimpangan
8.	The Challenge Of Poverty And The Poverty Of Islamic Economics	Dr. Mohammad Omar Farooq	Mengenai masalah kemiskinan dan ekonomi	Focus topic yang diteliti
9.	Peran ZIS Mengentaskan Kemiskinan Dan Kesenjangan	Dr Irfan Syauqi Beik/2010	Mengenai pengentasan kemiskinan dan kesenjangan	Cakupan wilayah serta variabel yang diteliti
10.	Strategi Pengelolaan ZIS Dalam Pengentasan Kemiskinan	Irsyad Andriyanto/2011	Menjelaskan bagaimana ZIS mengentaskan kemiskinan	Objek yang diteliti

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Zakat, Infaq & Shodaqoh

“Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar ZIS, berpuasa di bulan Ramadhan dan berhaji bagi yg mampu” (HR Muttafaq ‘alaih). Dalam hadits tersebut, zakat disandingkan dengan ibadah-ibadah wajib lainnya dalam islam, itu menunjukkan bahwa zakat juga merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam bagi yang mampu.

Dalam sejarah, zakat baru diwajibkan di Madinah. Meskipun ayat-ayat Al-Qur’an yang turun di Makkah menjelaskan mengenai perintah menunaikan zakat, tetapi belum menentukan batas dan besarnya. Al-Qur’an surat Al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Selain ayat tersebut, ada beberapa teks Al-Qur’an yang mengatur kedudukan Zakat dalam Islam, hampir semua mengandung penegasan, di antaranya:

1. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga sehingga kedudukannya merupakan pilar bangunan Islam yang sangat penting.
2. Zakat merupakan salah satu bukti identitas keislaman seseorang dan pembayarannya berhak atas persaudaraan dengan kaum muslimin.

3. Terdapat dua puluh delapan persandingan antara kalimat shalat dan Zakat di dalam al-Qur'an, hal ini menunjukkan keduanya adalah hal sangat penting dalam islam.
4. Al-Qur'an dan Hadits juga menguraikan adanya ancaman keras terhadap orang-orang yang tidak membayar Zakat. Ketentuan ini menjadi panutan bagi para sahabat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar Zakat.
5. Imam Ibnu al-Atsir dalam kitabnya Jaami' al-Ushul menyebutkan lebih dari seratus sepuluh hadits tentang Zakat. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan kepedulian yang cukup besar terhadap pentingnya Zakat.
6. Zakat pada dasarnya merupakan amal kebaikan yang juga dianjurkan pada zaman sebelum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kisah Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub: "Kami telah menjadikan mereka itu sebagaipemimpin~pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan Zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah." (QS al-Anbiya': 73). Demikian juga dianjurkan untuk Bani Israel: "Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah Zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling." (Qs Al-Baqarah: 83).

Dalam perkembangannya, Zakat mengalami perluasan tidak hanya pada definisi tetapi juga pada bentuk dan jenis hartanya. Pada masa awal munculnya Islam, kegiatan niaga dan transaksi keuangan yang menguntungkan seperti surat saham dan bursa efek, tabungan dalam bentuk premi dan dana pensiun, rumah dan kendaraan yang disewakan, mesin-mesin pabrik, dan pendapatan berdasarkan profesi belumlah dikenal.

Meskipun Al-Qur'an dan al-Sunnah menyebutkan harta yang wajib dikeluarkan Zakatnya secara rinci seperti hewan ternak, emas-perak, harta perdagangan, hasil pertanian, barang tambang dan rikaz, tetapi di sisi lain Al-Qur'an dan Sunnah juga hanya menyebutkan jenis harta secara global, misalnya hanya menyebut dengan kata-kata amwal (segala bentuk harta-benda) atau segala hasil usaha atau pendapatan yang halal.

Yusuf Al-Qardawi melihat bahwa perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat terjadi cukup signifikan, terlebih jika dibanding dengan kegiatan ekonomi pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Saat itu kegiatan ekonomi masyarakat yang menghasilkan masih terbatas seputar pada perdagangan, pertanian dan peternakan. Sementara sekarang, selain kegiatan ekonomi masyarakat sernakin berkembang, profesi petani atau peternak belum tentu sebanding dengan penghasilan profesi lain yang lebih mutakhir.

Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang artinya menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infaq memiliki arti memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam Al-Qur'an berkenaan dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf.¹¹ Jadi segala bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infaq, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah. Adapun dalil Al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

¹¹ Mardani, Fiqih Mu'amalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 17

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Adapun shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian.⁹ Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala.¹² Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah shadaqah.¹³ Dilihat dari pengertian tersebut, shadaqah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi.

Masyarakat sering menyamakan shadaqah dengan infaq. Tetapi, keduanya mempunyai pengertian yang berbeda, yang mana shadaqah lebih umum daripada infaq, jika infaq berkaitan dengan uang, sedangkan shadaqah bisa berupa uang dan benda-benda yang memiliki manfaat. Contoh dari shadaqah yaitu bisa berupa buku, baju dan barang yang masih layak guna lainnya, sedangkan infaq yang berupa uang yang biasanya infak cenderung merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif secara langsung, yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan.¹⁴ Adapun dalil Al-Qur'an yang menunjukkan tentang anjuran shadaqah seperti yang tercantum dalam surat Yusuf ayat 88:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ
مُرْجَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

“Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah

¹² Zuhdi, Studi Islam Jilid 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 82

¹³ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 3, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), 173.

¹⁴ Rosmini. Falsafah Infak Dalam Perspektif Alquran. Madania Vol. 20, No. 1, Juni 2016

kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.”

2.2 Konsep Lembaga Pengelola Zakat

Rasulullah SAW adalah yang pertama mendirikan lembaga Zakat dengan dimulai dengan mempekerjakan kaum Asad untuk mengelola Zakat. Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal juga pernah diutus Rasulullah menjadi disamping tugasnya menjadi da'i. Setelah Rasulullah wafat, pengelolaan Zakat dipegang oleh khulafaur-rasyidin. Sejak saat itu, pengambilan pendistribusian serta pengatur permasalahan Zakat menjadi semakin terstruktur dengan dibentuknya petugas khusus.

Zakat yang dikelola oleh lembaga amil Zakat yang memiliki hukum formal, memiliki beberapa keuntungan, antara lain, *pertama*, terjaminnya kepastian dan disiplin membayar Zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila menerima Zakat langsung dari muzaki. *Ketiga*, sasaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran dalam pendistribusian Zakat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.¹⁵

Sesuai Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil ZIS didirikan oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah.

1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

- a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.

¹⁵Abdurrahman Qadir, ZIS dalam Dimensi Madhab dan Sosial. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 85.

- c. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- d. Ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur utama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

a. Dewan Pertimbangan

A. Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial

B. Tugas Pokok

- a. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
- b. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- c. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum ZIS yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- d. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- f. Dalam pemeriksaan keuangan unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

b. Komisi Pengawas

A. Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

B. Tugas Pokok

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakankebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah,

c. Badan Pelaksana

A. Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan.

B. Tugas Pokok

- a. Membuat rencana kerja
- b. Melaksanakanoperasionalpengelolaan ZIS sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengankebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
- e. Bertindakdan bertanggungjawabuntuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun luar,

Salah satu tugas dari implementasi kemitraan yang penting adalah melakukan sosialisasi tentang ZIS kepada masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan, melalui berbagai forum dan media seperti khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar ZIS melalui lembaga ZIS yang kuat, amanah dan terpercaya.

Materi sosialisasi antara lain berkaitan dengan kewajiban ZIS, hikmah dan fungsinya, harta benda yang wajib dikeluarkan ZISnya, cara menghitung yang mudah, serta cara menyalurkannya.

Dan sejalan dengan UU No. 3912008 tentang perubahan keempat UU No.7 11983 tentang Pajak Penghasilan, maka kaitan antara Zakat dengan pajak ini perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat melalui kemitraan. Bermitra pengelolaan Zakat hanya dapat dilakukan dengan lembaga Zakat bentukan pemerintah (Baznas, Bazda Provinsi, Bazda Kabupaten Kota dan Bazda Kecamatan serta Lembaga Amil ZIS yang sudah dikukuhkan oleh Pemerintah

2.2.1 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat

Di dalam pengelolaan Zakat nasional terdapat tujuh azas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketujuh asas tersebut adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

A. Syariat Islam

Pengelolaan ZIS harus berdasarkan syariat Islam. Konsep dan mekanisme yang dipakai tidak boleh keluar dari syariat Islam. Dalam berbagai literatur hukum Islam yang menguraikan tentang Zakat, Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan didistribusikan kepada sekelompok masyarakat yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian hadits Nabi SAW banyak menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat detail dari jenis, masa-waktu, jumlah (kadar), serta siapa yang boleh dan tidak boleh menerima dan memberi. Syariat Islam telah memberikan batasan-batasan yang cukup jelas mengenai Zakat.

B. Amanah

Pengelolaan zakat harus dapat dipercaya. Belum maksimalnya pengelolaan zakat secara terlembaga disebabkan oleh belum tumbuhnya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada lembaga-lembaga pengelola zakat sehingga para *muzakki* lebih suka

mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*. Dengan adanya asas ini diharapkan dapat mendorong para pengelola zakat untuk melakukan upaya-upaya strategis demi tumbuhnya kepercayaan masyarakat.

C. Kemanfaatan

Apa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan di sini adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiq*. Pengelolaan zakat tidak boleh dilakukan hanya untuk meraih kemanfaatan pihak pengelola semata. Manfaat yang paling penting dan terukur adalah, bagaimana zakat dapat secara efektif meningkatkan pendapatan ekonomi *mustahiq* agar terbebas dari kemiskinan.

D. Keadilan

Artinya, pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil. Apa yang dimaksud dengan adil di sini tidak hanya mencakup skala prioritas berdasarkan proporsinya, melainkan juga kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para *mustahiq* secara faktual.

E. Kepastian hukum

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahiq* dan muzakki. Kepastian hukum bagi *mustahiq* berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum lainnya akan menjamin dan melindungi hak mereka mendapatkan zakat. Sementara bagi muzakki, terwujudnya ketenteraman batin atas kepastian jaminan keabsahan zakat yang telah ditunaikan. Zakat tersebut dapat digunakannya untuk mengurangi besar beban pajak yang harus itanggungnya. Sedangkan bagi amil zakat, dengan asas kepastian hukum, pengelolaan zakat itu akan memperoleh legalitas dan jaminan perlindungan hukum yang semestinya.

F. Terintegritas

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hirarki pengelolaan zakat secara kelembagaan melibatkan lembaga pengelola zakat yang dibentuk secara legal oleh

pemerintah dengan tetap memerhatikan regulasi dan pelaksanaan yang koordinatif satu sarna lain

G. Akuntabilitas

Artinya, pengelolaan zakat dapat dipertanggung-jawabkan dan diakses oleh masyarakat. Asas ini sangat penting dan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas mengandung kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan tanggung-jawab yang telah dipercayakan kepadanya di mana hasil dad kepercayaan itu dapat diperlihatkan kepada publik untuk dinilai secara terbuka.

Gambar 2.1 Sistem Pengelolaan Zakat Nasional

Sumber: BAZNAS, 2016

2.2.2 Tujuan Pengelolaan Zakat

Dalam pasal 3 undang-undang nomor 23/2011 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Di dalam pasal tersebut, terdapat dua tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Apa yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumberdaya untuk mencapai taraf hasil yang telah ditetapkan, hubungan antara pendayagunaan sumberdaya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

1. Ketersediaan teknologi pelaksanaan pekerjaan
2. Ketersediaan struktur kelembagaan

3. Ketersediaan sumberdaya manusia yang mumpuni
4. Terdapat dukungan kepada pelaksana pengelolaan zakat
5. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan merupakan program yang terus diupayakan dengan berbagai cara. Kemiskinan diyakini sebagai momok penghambat pembangunan sekaligus penghambat proses kemajuan. Kemiskinan yang ada di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat miskin dalam menjangkau sumber-sumber ekonomi, atau ketidakterediaan lapangan kerja yang memadai. Kemiskinan juga disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: belum maksimalnya prioritas program penanggulangan kemiskinan, belum optimalnya penggunaan solusi alternatif pendayagunaan sumber ekonomi, dan masih kuatnya budaya kemiskinan

Sesungguhnya ajaran Islam dengan konsep zakatnya telah memberikan landasan mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan kekuatan sosial ekonomi umatnya. Ajaran ini memiliki dimensi yang kompleks yang tidak dimiliki oleh ajaran agama atau aliran-aliran pemikiran ekonomi klasik maupun modern lainnya sehingga dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, ada banyak pandangan konstruktif tentang peran, fungsi dan potensi zakat, antara lain:¹⁶

1. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dalam membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (*economy growth with equality*).
2. Zakat cenderung pada pendistribusian harta secara egaliter dan menjaga sirkulasi peredarannya.
3. Zakat adalah merupakan sumber kas perbendaharaan negara sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang telah dicanangkan al-Qur'an.

¹⁶Anis Tyas Kuncoro. 2017. Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Kehidupan Ekonomi Umat. ulul albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. Vol. 1, No. 1, Oktober.

4. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi dan sentralisasi kepemilikan harta pada segelintir orang dan pada saat yang bersamaan akan mendorong manusia untuk melakukan pengembangan harta (investasi) dan menggalakkan distribusi.
5. Zakat merupakan ibadah maliyah ijtimai'iyah yang memiliki posisi strategis penting dan menentukan.
6. Hikmah diperintahkan kewajiban zakat atas kepemilikan harta kekayaan adalah untuk mendorong aktifitas ekonomi, perputaran modal sekaligus mengurangi aktifitas spekulasi dan penimbunan barang (ihtikar).

2.2.3 Penggunaan Dana Zakat

Dari sisi pemanfaatan maka pola penggunaan dana zakat di Indonesia terkonsentrasi pada 4 sektor, yaitu:

1. Bantuan melalui kelompok binaan

Yang dimaksud dengan bantuan kelompok binaan adalah memberikan bantuan modal usaha bagi kelompok yang mempunyai kemampuan untuk berusaha sebagai upaya untuk mempertahankan kehidupan baik bagi diri sendiri - keluarga dan kelompok itu sendiri agar pengembangan ekonomi dapat dikalangan mustahiq lebih meningkat.

2. Pemberdayaan ekonomi dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat. Kegiatan ini bisa terbagi kedalam berbagai bentuk, misalnya:
 - a. Pemberian bantuan uang sebagai modal kerja ataupun untuk membantu pengusaha meningkatkan kapasitas dan mutu produksi.
 - b. Bantuan pendirian gerai-gerai untuk memamerkan dan memasarkan hasil-hasil industri kecil, seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan lain-lain.
 - c. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai parneran.
 - d. Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjarnin keberlanjutan usaha, misalnya klinik konsultasi bisnis (kkb) yang rnembangkan strategi pemberdayaan

pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan, dan informasi.

- e. Pembentukan lembaga keuangan lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (lkms) misalnya dengan pendirian bmt atau lembaga ekonomi bagi hasil (leb)
 - f. Pembangunan industri modal dan investasi yang dapat disalurkan lembaga zakat melalui pembangunan industri atas inisiasi lembaga zakat. Selain itu, lembaga zakat pada tahap awal bertugas sebagai manajer, sedangkan para pekerjanya adalah para mustahik yang berada di lingkungan industri.
3. Pendidikan
- a. Beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terdidik, diperlukan banyak beasiswa. Ini berlaku untuk program beasiswa formal (sekolah dasar, lanjutan, dan perguruan tinggi), maupun pendidikan non formal (program-program pelatihan, keterampilan, atau keahlian tertentu).
 - b. Orang tua asuh salah satu upaya lembaga zakat dalam bidang pendidikan adalah dalam bentuk orang tua asuh, diberikan oleh perseorangan, dan juga sebagian lagi oleh lembaga termasuk perusahaan. Akan tetapi, kegiatan orang tua asuh yang diberikan oleh individu anggota masyarakat umumnya lebih dominan. Pola bantuan yang umum diberikan adalah dengan memberikan bantuan pembayaran biaya pendidikan.
 - c. Pendidikan melalui swadaya masyarakat program pendidikan seperti ini umumnya didirikan atas inisiatif dan dikelola langsung oleh kelompok masyarakat atau lembaga dan adakalanya bukan sekolah formal.
 - d. Pembangunan fisik sarana pendidikan. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada kondisi dan waktu yang memang dianggap diperlukan (bersifat tidak rutin). Misalnya memperbaiki sarana sekolah dan bangunan sekolah yang mengalami

kerusakan, serta pembangunan fasilitas dan gedung sekolah pada lokasi yang memang belum memiliki fasilitas tersebut

4. Layanan sosial

Yang dimaksud layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahik dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mustahik sangat beragam, tergantung kondisi yang tengah dihadapi. Dari kebutuhan yang paling mendasar, seperti kebutuhan makan hari ini, kebutuhan pengobatan, bayar spp dan tunggaknya, biaya transportasi pulang kampung.

2.2.4 Konsep Pendistribusian Dana Zakat

Distribusi zakat merupakan pembagian atau penyaluran dana zakat kepada masyarakat yang butuh dan layak untuk menerimanya, yaitu biasa disebut dengan mustahik. Distribusi dana zakat tersebut, dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Pendistribusian secara konsumtif,

Konsep pendistribusian secara konsumtif yaitu pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Pendistribusian zakat tersebut hanya memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri. Zakat konsumtif dapat berupa bahan makanan pokok, sandang, dan lain-lain.

2. Pendistribusian secara produktif

Pendistribusian secara produktif diberikan baik dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan

kewilayahan. Pendistribusian zakat secara produktif dapat dilakukan dengan akad *qardhul hasan* atau *mudharabah*.

2.3 Teori Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan/disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*Developed Region*) dan daerah terbelakang (*Underdeveloped Region*)¹⁷

Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat¹⁸, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan diberbagai wilayah tersebut.¹⁹

Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik.²⁰

Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, bila proses

¹⁷ Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

¹⁸ Kuncoro, Murdijat. 2006. "Ekonomi Pembangunan", Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

¹⁹ Sadono, Sukirno. 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

²⁰ Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

pembangunan berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi umumnya pada negara-negara sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negara- negara maju. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini diuji kebenarannya oleh Williamson²¹ melalui studi mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang menggunakan data time series dan cross section. Hasilnya menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, akan tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya.²²

²¹ Williamson, J.G. 1965. Regional and Equility and The Process of National Development: A Description Patern. Economic Development and Cultural Change, Vol. 13, No. 4, Hal. 3-45.

²² Sjafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Melajunya ekonomi dengan sangat pesat yang menyebabkan ratio tabungan yang dimiliki oleh masyarakat kelas menengah keatas lebih tinggi dari pada ratio tabungan yang dimiliki oleh masyarakat kelas menengah kebawah, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan aggregate saving rate yang mengakibatkan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi situasi tersebut malah berdampak buruk mengakibatkan tidak meratanya pola distribusi pendapatan.²³

Simon Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan biasanya buruk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U Terbalik”, karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern. Koefisien Gini terlihat seperti kurva berbentuk “U Terbalik”, seiring dengan naiknya PDRB²⁴ seperti terlihat pada gambar

Gambar 2.2 Kurva Kutznet

²³Todaro M.P. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta

²⁴ Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi (edisi kesebelas, jilid I). Jakarta : Erlangga

Sumber: Todaro & Smith, 2011

Dengan demikian, model Kuznets dan Kaldor menunjukkan adanya *trade off* atau pilihan antara pertumbuhan PDRB yang lambat tetapi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

2.4 Ukuran Ketimpangan

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau mengetahui apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, digunakan kategorisasi kurva Lorenz, menggunakan koefisien Gini, dan kriteria Bank Dunia

1. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.

2. Indeks Gini atau Rasio Gini

Gini Ratio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan

mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.

3. Kriteria Bank Dunia

Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk.

Tabel 2.1 Indikator Ketimpangan Bank Dunia (World Bank)

Klasifikasi Ketimpangan	Ketimpangan distribusi pendapatan
Ketimpangan tinggi	40% penduduk berpendapatan rendah menerima <12% dari total pendapatan
Ketimpangan sedang	40% penduduk berpendapatan rendah menerima 12% -17% dari total pendapatan
Ketimpangan rendah	40% penduduk berpendapatan rendah menerima >17% dari total pendapatan

Sumber: World Bank

2.5 Konsep Kesejahteraan

kesejahteraan diukur berdasarkan seberapa besar hasil barang dan jasa yang produksi dan dikonsumsi. karenanya yang disebut dengan istilah negara maju adalah yang menikmati pendapatan tinggi, tanpa memperhatikan tingkat kemunduran nilai-nilai spiritual masyarakatnya; sedangkan negara terkebelakang adalah negara dengan pendapatan rendah. Sosialisme di sisi lain melihat masyarakat

sejahtera dengan pendekatan komunal. Kesejahteraan bisa dicapai melalui pemerataan yang diatur oleh negara atau pemerintah, agar supaya terjadi keadilan.²⁵

Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) rasa aman (*security*), (2) Kesejahteraan (*welfare*), (3) Kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*Identity*).²⁶

Terdapat berbagai perkembangan pengukuran tingkat kesejahteraan dari sisi fisik, seperti Indeks pembangunan Manusia (*Human Development Index*), Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality Life Index*), Kebutuhan Dasar (*Basic Needs*), dan Pendapatan Perkapita (*GNP/Kapita*). Ukuran kesejahteraan ekonomi inipun dapat dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala

²⁵ Saifullah, Eddyson “ Konsep Masyarakat Sejahtera Dalam Perspektif Islam “ Disertasi Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun, 2008

²⁶Nasikun. 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.

usaha). Dari sisi konsumsi, kesejahteraan bisa diukur dengan menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya dalam periode tertentu

2.5.1 Indikator Kesejahteraan

Badan Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :²⁷

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya

²⁷BPS, 2005

Konsep kesejahteraan dapat dikaji dari 3 aspek yakni²⁸ (1) Tingkat perkembangan fisik (*somatic status*), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; (2) Tingkat mentalnya, (*mental/educational status*) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) Integrasi dan kedudukan sosial (*social status*).

2.6 Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Ketimpangan

Melonjaknya harga komoditas merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan. Harga-harga yang tinggi tersebut hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kalangan menenga keatas. Pemerintah membuat rancangan strategi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu:

1. Lebih memperhatikan kesehatan dibawah 5 tahun, terutama pada penderita gizi buruk, yang dipandang memperparah persentase tingkat kemiskinan
2. Beberapa bantuan pemerintah yang belum tepat sasaran akan disalurkan lebih baik lagi
3. Memprioritaskan pendidikan vokasi untuk mengurangi tingkat pengangguran
4. Menurunkan ketimpangan kekayaan yang selama ini masih didominasi oleh kalangan pekerja
5. Menggalakkan wirausaha secara massal. Dibeberapa negara Asia, kemiskinan dapat ditekan melalui dibentuknya wirausaha.

Perbaikan kualitas hidup melalui rancangan strategi tersebut diprediksi

²⁸Bintarto. 1989. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta

dapat menurunkan tingkat ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, pemerintah berencana membangun beberapa infrastruktur guna mempermudah konektivitas antar daerah. Subsidi dan bantuan sosial turut digelontorkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Subsidi dan bantuan sosial pada APBN 2017 mencapai Rp114,5 triliun yang terdiri dari Rastra (Rp21,4 triliun), Bantuan Kesehatan (Rp26 triliun), Bantuan Pendidikan (Rp10,8 triliun), Program Keluarga Harapan (Rp11,3 triliun), dan Subsidi Listrik (Rp45 triliun).²⁹

Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.³⁰

2.7 Teori Manajemen Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu *strategos* yang berarti jenderal. Maka dari itu, strategi dapat diartikan sebagai “strategi para jenderal”. Kata mengacu pada suatu puncak organisasi dan secara khusus, strategi dapat diartikan sebagai ‘penempatan’ untuk misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal serta perancangan kebijakan untuk mencapai sasaran dan memastikan penerapannya sesuai tujuan dan sasaran utama sebuah organisasi akan tercapai.³¹

2.7.1 Jenis-Jenis Strategi

Penggolongan/klasifikasi strategi berikut bertujuan untuk menjelaskan beberapa dimensi strategi, yaitu:

3. Klasifikasi berdasarkan ruang lingkup. Strategi dapat

²⁹<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-strategi-pemerintah-atasi-ketimpangan-sosial/>

³⁰Jadidah & Puadi. 2017. Tata Kelola Kelembagaan ZIS Di Malang, Baznas, El-Zawa UIN, Dan YDSF. Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj. Vol.01 No.02 : 114 - 143

³¹Steiner & Milner. 1982. Management Policy And Strategy. Jakarta: Erlangga.

didefinisikan sebagai sesuatu yang luas, tergantung bagaimana dalam mendefinisikannya. Beberapa buku menjelaskan bahwa, hal itu disebut dengan strategi utama atau strategi akar. Strategi juga bisa disebut dalam lingkup yang lebih sempit yaitu strategi program.

4. Strategi dapat diklarifikasikan sesuai dengan hubungan tingkat organisasi. Sebuah perusahaan, terdiri atas beberapa divisi. Biasanya terdapat dua tingkat, yaitu, strategi kantor dan strategi divisi.
5. Strategi dapat diklarifikasikan apakah strategi tersebut berkaitan dengan sumber material atau bukan material. Mayoritas strategi berhubungan langsung dengan sifat fisik. Namun, strategi juga dapat berhubungan dengan penggunaan tenaga manajer, ilmuwan dan lain-lain. Selain itu, strategi juga bisa berupa gaya manajemen, pola berpikir atau falsafah tentang hal-hal yang merupakan sikap suatu perusahaan terhadap tanggung jawab sosial.
6. Strategi dapat dikelompokkan menurut tujuan atau fungsi. Seperti, pertumbuhan adalah hal yang utama dalam suatu perusahaan dan mayoritas perusahaan memiliki lebih dari satu strategi yang dapat dipilih untuk menunjang pertumbuhan perusahaan tersebut.
7. Strategi pribadi manajer. Semakin tinggi tingkat manajer,

semakin penting pula arti strategi ini bagi kehidupan organisasi. Strategi tersebut, merupakan petunjuk praktis yang meliputi nilai-nilai, motivasi, perlindungan terhadap sikap bermusuhan dari lingkungan, metode mengubah lingkungan, teknik bergaul serta memaksimalkan kepuasan pribadi. Strategi ini merupakan strategi yang mendasar, biasanya bersifat tidak tertulis dan merupakan kerangka untuk menyusun strategi perusahaan.

2.8 Teori Manajemen Strategi Syariah

Manajemen strategi syariah merupakan rangkaian suatu proses kegiatan manajemen islami yang meliputi tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi keputusan strategis organisasi. Untuk membedakan dengan manajemen strategi konvensional, manajemen strategi syariah memiliki 4 ciri karakter, yaitu: azas, orientasi, motivasi dan strategi.³²

Dalam pelaksanaannya, manajemen strategis syariah harus sesuai dengan asas tauhid serta berorientasi dunia dan akhirat yang bertujuan untuk mengharapkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Penyusunan dan implementasinya juga menerapkan strategi-strategi yang mengacu pada ketentuan-ketentuan syariah islam dan tentu saja tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits.

³²Usman, A H. 2015. Manajemen Strategis Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.

Gambar 2.3 Model Manajemen Strategi Syariah

Sumber: Usman, 2015

Model tersebut menunjukkan bahwa visi, misi dan tujuan manajemen strategi syariah telah diinternalisasi dan mengandung unsur-unsur islami. Demikian pula pada tahap formulasi hingga implementasinya yang tetap berada dalam koridor nilai dan etika syariah, seperti mempertimbangkan halal dan haram. Dosa dan pahala serta sistem praktek kerjasama yang jauh dari aspek ribawi.

Dalam pelaksanaannya, manajemen strategi syariah memiliki lima teori yang disebut *Five Power of the Sharia Strategic Management*. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kelima teori tersebut harus dijalankan secara terpadu dan tidak parsial agar kinerja yang baik dapat tercapai serta mendapatkan hasil yang maksimal. Seluruh bagian yang andil dalam berjalannya perusahaan harus menjalankannya dan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan kelima teori tersebut dan sembari terus mengharapakan bimbingan dan keridhaan Allah SWT.

Pertama, Azas Tauhid pada organisasi atau perusahaan. Penetapan azas tauhid ini sebagai dasar dari segala aktifitas yang berjalan di sebuah

organisasi/perusahaan serta untuk meyakinkan bahwa hanya Allah SWT lah yang memiliki kekuasaan serta pengatur segala kehidupan makhluk yang ada di dunia ini dan dengan berserah diri hanya kepadaNya akan menambah keyakinan bagi manajemen dan pengelola untuk berhasil mencapai visi, misi dan tujuan serta menjadi perusahaan atau organisasi yang bermaslahat dunia maupun akhirat.

Kedua, Orientasi Duniawi dan Ukhrawi. Dengan ditetapkannya tujuan perusahaan yang berorientasi duniawi dan ukhrawi, maka diharapkan profit, benefit serta manfaat yang diperoleh akan menyebabkan ketenangan, ketentraman dan kepuasan bagi pengurusnya dalam bekerja dan beraktifitas. Sehingga diperoleh kebahagiaan dalam menjalankan organisasi dan perusahaan.

Ketiga, Motivasi Mardhatillah. Dengan motivasi mardhatillah yaitu semua aktifitas yang berlangsung dalam perusahaan atau organisasi diniatkan semata-mata hanya pada Allah SWT dan hanya kepadaNya lah mengharap ridha dan pahala. Motivasi Mardhatillah diharapkan memberi dorongan yang kuat kepada pengelola perusahaan atau organisasi untuk mencapai keberhasilan usahanya di dunia maupun di akhirat.

Keempat, Keyakinan Ubudiyah dalam bekerja. Dengan keyakinan ubudiyah yaitu meyakini bahwa bekerja adalah ibadah maka segala aktifitas yang berlangsung dalam sebuah organisasi atau perusahaan diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT yang mana hal tersebut akan memberi kekuatan bagi semua manajemen untuk mengatasi dan menghadapi berbagai macam kendala dan rintangan serta memberi kepuasan, ketenangan serta kebahagiaan dalam menjalani aktifitas yang ada didalam perusahaan atau organisasi tersebut demi mengharapkan

keridhaan Allah SWT.

Kelima, Kesadaran Ihsaniyan dalam bekerja. Kesadaran ihsaniyah meyakini bahwa segala aktifitas yang dilakukan di perusahaan atau organisasi merupakan amal shaleh yang senantiasa diketahui dan diawasi oleh Allah SWT, hal tersebut akan mendorong manajemen dan pengelola untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, jujur, amanah dan itqan (tepat, sempurna, tuntas) tanpa harus diawasi oleh atasan sehingga mendorong tercapainya hasil kinerja yang terbaik.

2.9 Kerangka Konseptual

Angka kesenjangan yang terus meningkat di beberapa wilayah di Indonesia menjadi fokus evaluasi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam penanganannya. Berbagai macam kebijakan, baik fiskal maupun moneter telah diberlakukan, tetapi juga masih belum ada dampak yang signifikan pada masyarakat.

Pasca dibentuknya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan ZIS, pemerintah mulai menjadikan ZIS sebagai kebijakan nasional serta memaksimalkan potensi atas besarnya ZIS yang terkumpul guna penanganan kesenjangan yang ada. Meskipun penerimaan dana ZIS bersifat fluktuasi, tetapi pendistribusian ZISnya justru mengalami peningkatan. Pendistribusian dilakukan dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif.

Dengan besarnya potensi ZIS tersebut maka, BAZNAS Kota Malang dituntut untuk terus melakukan pengembangan strategi agar mampu mengelola dan mendistribusikan ZIS secara menyeluruh agar diharapkan dapat mengurangi angka tingkat kesenjangan.

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab tiga ini, peneliti akan menjelaskan tentang metode penelitian secara berurutan dan beberapa pembahasan yaitu meliputi: 1) pendekatan dan jenis penelitian, 2) latar penelitian, 3) kehadiran peneliti, 4) data dan sumber data penelitian, 5) teknik pengumpulan data, 6) teknik analisis data, 7) dan pengecekan keabsahan data. Penjelasan selanjutnya berikut ini.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode penelitian merupakan salah satu cara ilmiah untuk mempermudah hal tersebut. Dalam prosesnya ada empat langkah yang perlu dilakukan, yaitu ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.³³ Penelitian yang dibuat ini bersifat ilmiah dan berarti kegiatan penelitian berdasarkan kepada ciri-ciri keilmuan seperti rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti proses penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga mudah dijangkau oleh pikiran manusia. Empiris yaitu cara-cara yang dilakukan dapat dilihat oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui proses yang dilakukan. Dan sistematis yaitu rangkaian yang dipergunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 2.

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif sebagai sarana untuk menelaah strategi dalam mengatasi ketimpangan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebab penulis menilai sifat dari permasalahan yang diangkat dapat berkembang terus menerus sesuai kondisi dan situasi yang terjadi dalam masyarakat. Dengan pengembangan penelitian yang alamiah maka hasil informasi dalam penelitian ini akan menjadi lebih beragam.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendefinisikan strategi BAZNAS Kota Malang dalam mengatasi ketimpangan, sehingga perlu pendalaman dalam memahami makna strategi BAZNAS Kota Malang dalam mengatasi ketimpangan. Selain itu, terpilihnya studi kasus sebagai alat analisis bertujuan untuk mempertahankan keutuhan subjek penelitian yaitu BAZNAS Kota Malang, dan fokus penelitian nantinya akan dijabarkan melalui rancangan deskriptif.

Metode deskriptif akan mengamati berbagai macam objek yaitu kelompok manusia, kondisi, peristiwa dan sistem pemikiran. Selanjutnya hal-hal yang diteliti yang bersangkutan dengan strategi BAZNAS Kota Malang dalam mengatasi ketimpangan akan mengemukakan data sesuai fakta di lapangan secara detail dan disajikan secara ilmiah serta apa adanya.

Di era ekonomi modern saat ini, keberadaan lembaga ZIS bukan hanya untuk mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat, tetapi lembaga ZIS juga memiliki peran yang aktif dalam menggerakkan ekonomi suatu wilayah. ZIS telah diwajibkan sejak zaman Rasulullah untuk memenuhi kebutuhan semua orang yang tidak mampu membantu dirinya sendiri karena kecacatan yang berada

diluarkontrolnya.³⁴

Jika semua kewajiban telah dilaksanakan tetapi masih saja ada kemiskinan bersanding dengan kekayaan, maka masyarakat tersebut tidak layak dipandang sebagai sebuah masyarakat muslim yang sebenarnya. Seperti Rasulullah SAW menegaskan:

“Bukanlah seorang muslim yang sebenarnya apabila orang yang kenyang perutnya sementara tetangganya kelaparan”

Hadits tersebut menjadi dasar penelitian ini bagaimana strategi sebuah lembaga ZIS dalam mengatasi ketimpangan yang ada di masyarakat. Peneliti memilih BAZNAS untuk dijadikan objek penelitian karena, lembaga tersebut dikenal memiliki sepak terjang yang sudah cukup lama dalam menangani perZISan di Indonesia.

3.2 Latar Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Badan Amil Zakat Kota Malang yang beralamat di Jl. Simpang Mojopahit No.1 Kota Malang, Jawa Timur. Keberadaan Baznas kota Malang secara kelembagaan didasarkan atas Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor DJ. II/568 Tahun 2014, Tanggal 5 Juni 2014, berdasarkan atas Surat Baznas Nomor 08/BP/BAZNAS/IV/2014, tanggal 10 April 2014, tentang pertimbangan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota.

Secara operasional kepengurusan Baznas Kota Malang didasarkan atas Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45/35.73.112/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang. Kedudukan Baznas Kota Malang sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2011, Bab I tentang Ketentuan Umum, pasal 1

³⁴Chapra, M. Umer. 2000. Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakart: Gema Insani Press

ayat (7) menjelaskan bahwa kedudukan Baznas merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan ZIS secara nasional. Selanjutnya dalam Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional, Bagian Ketiga tentang Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota, Pasal 15 ayat (5) dijelaskan bahwa Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan fungsi dan tugas Baznas di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.3 Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dan memerlukannya.³⁵Data tersebut diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi singkat kepada pengurus dan mustahik BAZNAS Kota Malang. Data primer yang dikumpulkan berupa data mustahik, pendistribusian ZIS, kondisi masyarakat dan pelaksanaan program kerja yang dilakukan BAZNAS Kota Malang. Wawancara dilakukan kepada Bapak Abdul Ashari padabidang pendistribusian, untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana BAZNAS menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan serta proses pendistribusian ZIS kepada masyarakat yang membutuhkan, Ibu Faiza Milati sebagai penanggungjawab bidang keuangan, untuk mengumpulkan informasi berupa besaran ZIS yang diterima dan didistribusikan dan Sdr. Diniyah Ulla sebagai penanggung jawab bidang administrasi, untuk memperoleh data-data mustahik untuk diwawancara. Untuk mustahik,

³⁵Hasan. M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

wawancara dilakukan untuk memperoleh kondisi riil masyarakat, jenis bantuan yang diterima oleh mereka serta perbedaan dampak yang diperoleh saat sebelum dan setelah adanya bantuan yang diberikan oleh BAZNAS. Data primer yang diperoleh berupa laporan pendapatan ZIS periode tahun 2019, program yang sedang dilaksanakan oleh BAZNAS serta informasi dan kondisi mengenai mustahiq di lapangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh diluar diri peneliti sendiri, meskipun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.³⁶ Data-data sekunder didapatkan melalui skripsi, jurnal ilmiah, tesis sebagai penelitian terdahulu, website resmi BAZNAS Kota Malang (<https://baznas.malangkota.go.id/>), BPS, media baik cetak maupun online, laporan keuangan dan brosur milik BAZNAS Kota Malang. Data sekunder bertujuan untuk menunjang kelengkapan dari data primer. Data sekunder yang diperoleh berupa pertumbuhan ekonomi Kota Malang, profil dan struktur organisasi BAZNAS dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehubungan dengan data primer dan data sekunder yang dibutuhkan dalam dalam penelitian ini, maka sumber data yang penulis pilih antara lain:

1. Informan kunci (*key informan*) yaitu informan yang tidak sekedar memberikan keterangan mengenai data yang dibutuhkan oleh peneliti tetapi juga memberikan saran tentang sumber-sumber bukti

³⁶ Winarno, Surakhmad. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*. Bandung: Tarsito

lain yang mendukung serta mampu mengarahkan dan memberikan referensi pilihan informan lain dengan membuka peluang kemudahan informasi dari sumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai informan kunci (*key informan*) tentang tema penelitian yang berkaitan dengan strategi BAZNAS dalam menangani ketimpangan adalah pengelola & pengurus BAZNAS, yaitu Bapak Abdul Ashari sebagai penanggungjawab bidang pendistribusian, Ibu Faiza Milati sebagai penanggungjawab bidang keuangan dan Sdr. Diniyah Ulla sebagai penanggung jawab bidang administrasi.

2. Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan data yang relevan dengan penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari BAZNAS Kota Malang berupa profil singkat lembaga, buku, laporan keuangan, media promosi serta artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini terdapat beberapa teknik atau metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.4.1 Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi didapat secara langsung dari objek penelitian dengan mengajukan pertanyaan mengenai penelitian

³⁷Mardalis. 2008. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.

yang dilakukan. Terdapat dua jenis wawancara berdasarkan strukturnya, yaitu wawancara terbuka dan wawancara tertutup. Wawancara terbuka yaitu informan diberikan kebebasan untuk menjelaskan informasi yang berkaitan dengan konteks penelitian tanpa ada pertanyaan yang terperinci oleh peneliti. Wawancara yang cocok untuk penelitian kualitatif adalah wawancara terbuka agar mendapatkan data yang lengkap dan lebih mendalam.³⁸

Sedangkan wawancara tertutup ialah wawancara dengan pertanyaan yang difokuskan pada pertanyaan khusus dan umum dengan bantuan wawancara yang telah dirinci. Dalam wawancara tertutup ini, peneliti harus menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepadainforman.

Penelitian ini akan menggunakan kedua jenis wawancara di atas. Keduanya dipakai dengan maksud agar hasil penelitian yang didapatkan dapat lebih rinci namun peneliti juga akan menyiapkan daftar pertanyaan untuk menjaga agar proses wawancara sesuai dengan konteks atau tema yang diteliti.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dan tertutup untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari informan. Penggunaan kedua jenis wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan hasil wawancara yang lebih rinci dan sesuai dengan konteks penelitian.

Wawancara dilakukan kepada pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang (BAZNAS) mulai dari pengelola bagian pendistribusian, bagian keuangan

³⁸Djaelani, Aunu Rofiq. 2013. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. Semarang: FPTK IKIP Veteran

dan bagian administrasi. Ditambah dengan wawancara kepada masyarakat, yaitu:

1. Ibu Sumiyatin (beralamat di Jalan Jakarta dalam), mustahik penerima bantuan kemanusiaan dan ekonomi.
2. Ibu Rusmini (beralamat di Jalan Jakarta Dalam), mustahik penerima bantuan kemanusiaan dan ekonomi
3. Ibu Nurkhasanah (beralamat di Jalan Satsui Tubun, Kacuk, Kebonsari), mustahik penerima bantuan bedah rumah dan ekonomi.

Wawancara kepada penerima bantuan dana ZIS dilakukan sebagai informan pendukung untuk mengetahui bagaimana dampak sebelum dan setelah diberikannya bantuan dana ZIS.

3.4.2 Observasi

Observasi merupakan cara untuk mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan individu maupun kelompok individu yang diteliti, kemudian hasil pengamatan tersebut dicatat dan dianalisis agar dapat diketahui apa yang terjadi. Dengan melakukan observasi, fenomena pada obyek yang diteliti dapat dilihat, dialami maupun dirasakan.

Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi agar peneliti dapat memahami keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Observasi dilakukan ketika mencari tempat penelitian, dengan mengamati kondisi perekonomian dan ketimpangan Kota Malang. Selain itu, juga mengamati perZISan Kota Malang, observasi juga dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan melihat kondisi

masyarakat dengan pendampingan dari pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang untuk mengetahui mengenai bagaimana ZIS bergerak mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Malang.

Teknik observasi yang digunakan adalah partisipasi peneliti dalam berinteraksi secara langsung dalam situasi sosial³⁹ serta terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati atau disebut dengan *participant observation*, dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih tajam, lengkap sehingga sampai pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁴⁰

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis mengenai strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional khususnya Kota Malang dalam mengatasi ketimpangan.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan kumpulan data-data yang digunakan untuk memperkuat keabsahan data. Dokumen tersebut dapat berbentuk catatan, file, foto, video, rekaman, dan lainnya. Dengan adanya dokumentasi ini selama mencari informasi dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, dan penarikan kesimpulan.

Kajian terhadap dokumen dapat dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapatkan dari catatan, file dan bentuk dokumen yang lainnya. Dokumen yang telah diperoleh akan memudahkan peneliti apabila menemukan kekeliruan

³⁹ Iskandar, *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial*,(Jakarta: Gaung persada press.2009) cet,II,h.77

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,h.145

atau kesalahan pada hasil kegiatan berkat sumber data yang tetap.

Dokumentasi yang dikumpulkan berupa bukti wawancara berupa rekaman suara, foto bersama informan utama maupun pendukung serta data-data yang berkaitan dengan BAZNAS pada saat menyalurkan bantuan dana ZIS.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penulis memasuki lapangan, selama di lapangan, hingga setelah selesai di lapangan. Analisis data ini lebih terfokus pada proses penelitian di lapangan.

Dalam penelitian mengenai strategi lembaga zakat dalam mengatasi ketimpangan pada Badan Amil Zakat Nasional khususnya Kota Malang, penulis melakukan analisis data menggunakan model Miles-Huberman yakni.⁴¹

- a) Dilakukan saat pengumpulan data berlangsung hingga selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
- b) Saat wawancara, penulis melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai dan bila dirasa masih ada hal yang belum sesuai harapan dan tujuan penelitian, penulis lalu melanjutkan wawancara sampai ke dalam satu tahapan perolehan data yang kredibel.

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 246.

Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles-Huberman

Sumber: Sugiyono, 2014

Penjelasan mengenai analisis data model Miles-Huberman yang tergambar di atas ialah:

1) *Data collection* atau pengumpulan data

Dengan berbagai teknik berupa observasi, wawancara, dokumen, dan triangulasi. Wawancara dilakukan peneliti dengan narasumber yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional khususnya Kota Malang untuk memperoleh gambaran mengenai strategi lembaga zakat dalam mengatasi ketimpangan dan kontribusi pemberdayaan masyarakat yang terwujud denganberlangsungnyapendistribusian ZIS.

2) *Data reduction* atau reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum data- data yang direkam hasil wawancara dengan mengetik ulang secara lengkap yang berlanjut pada kegiatan memilih

hal-hal pokok dan terfokus pada hal penting. Selanjutnya peneliti mencari tema dan polanya. Reduksi data hasil wawancara ini peneliti cantumkan dalam bablampiran.

3) *Data display* atau penyajian data.

Penyajian atau *display* ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya untuk memudahkan memahami apa yang terjadi serta merencanakan *planning* dan targetselanjutnya.

4) *Conclusion drawing/verification* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi.

cenderung berubah apabila tidak ada bukti-bukti kuat yang mendukung setelah dilakukan penelitian mengenai strategi Badan Amil Zakat Nasional khususnya Kota Malang dalam mengatasi ketimpangan. Setelah penelitian ini dilakukan ada kesimpulan baru yang peneliti temukan terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional dan upaya dalam mengatasi ketimpangan. Hal ini penulis jelaskan di bab 5 mengenai pembahasan hasil penelitian.

Analisis data model Miles-Huberman dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas dan datanya jenuh. Saat dilakukan wawancara peneliti segera menganalisis jawaban-jawaban hasil wawancara dan karena ditemukan beberapa hal yang masih terpecah dengan tema, peneliti melanjutkan kembali wawancara hingga memperoleh data yang kredibel (metode snow balling).

3.6 Metode Validasi Data

Metode validitas data dalam penelitian diidentikkan dengan uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif kriteria utama keabsahan data hasil penelitian ialah valid, reliabel, dan obyektif.

Pengecekan keabsahan data adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan. Ada empat kriteria dalam pengujian keabsahan data penelitian strategi lembaga zakat dalam mengatasi ketimpangan yang penulis jelaskan:

- 1) Validitas internal ialah pengecekan derajat validitas data atau kepercayaan data untuk membuktikan apakah pengamatan peneliti benar-benar telah sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Upaya validitas ini dilakukan dengan:
 - a. Perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan yang dimaksud ialah peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan observasi ulang, wawancara dengan sumber data yang sudah pernah ditemui atau sumber data baru untuk memperoleh kepastian/validitas data.
 - b. Meningkatkan ketekunan. Peneliti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan agar kepastian data dan urutan peristiwa bisa direkam secara pasti dan sistematis.
- Penulis sebelumnya telah memiliki bekal wawasan setelah membaca referensi di buku, jurnal penelitian terdahulu, atau dokumentasi lain yang terkait dengan strategi lembaga zakat dalam mengatasi ketimpangan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara

dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga, yakni:

1. Triangulasi sumber

Dilakukan dengan mengecek berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis dan disimpulkan yang kemudian dimintai kesepakatan bersama (*member check*) mengenai hasil triangulasi sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik ialah metode pengujian kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan berbagai sumber yang sama tapi dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data pertama diperoleh melalui wawancara maka pengecekan dapat dilakukan dengan teknik observasi atau dokumentasi

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan mengecek berbagai sumber yang sama teknik yang sama namun dengan waktu yang berbeda dari penelitian pertama. Misalnya, pengambilan data dilakukan pada sore hari maka pengecekan dapat dilakukan pada pagi atau siang hari. Jika data yang diperoleh hasilnya sama maka dapat dikatakan data tersebut kredibel.

- b. Menggunakan referensi sebagai peralatan pendukung untuk membuktikan data yang sudah ditemukan peneliti yakni hasil wawancara yang dilengkapi dengan rekaman wawancara interaksi saat atau setelah wawancara dilengkapi dengan foto sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih otentik.

- c. Mengadakan *member check*. *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari *member check* ini untuk mengetahui seberapa jauh data sudah diperoleh sesuai yang diberikan pemberi data. Selain itu tujuan *member check* ialah agar informasi yang diperoleh yang digunakan sebagai data penelitian sesuai dengan apa yang dimaksudkan sumber.
- 2) Validitas eksternal atau *transferability*. Transferabilitas dilakukan dengan melaporkan hasil penelitian secara rinci. Uraian laporan penelitian untuk mengungkap secara khusus segala sesuatu yang diperlukan pembaca nantinya agar pembaca dapat memahami temuan-temuan penelitian yang diperoleh. Penemuan ini dicapai dengan ‘uraian rinci’ karena laporan tersebut harus dijabarkan dengan tanggung jawab berdasarkan fakta-fakta lapangan.
 - 3) Reliabilitas atau dependabilitas dilakukan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian.
 - 4) Objektivitas yakni harus bisa dikonfirmasi. Kehadirannya diperlukan untuk mengetahui data yang diperoleh objektif atau tidak. Jika sudah disepakati banyak orang bisa disimpulkan data tersebut objektif. Penentuan kepastian data penelitian dilakukan dengan mengonfirmasi data dengan para informan atau ahli yang dilakukan bersama-sama dengan pengujian dependabilitas di atas. Pengauditan obyektivitas ini untuk menjamin keterkaitan antara data, informasi, dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan penelitian serta didukung bahan-bahan yang tersedia

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian berupa paparan data dan temuan penelitian yang ditemukan di lapangan guna membahas Strategi BAZNAS Kota Malang dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi, serta dampak penerapan strategi pendistribusian dana zakat, infaq & shodaqoh melalui program-program kinerja yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Malang untuk para mustahiq dalam bentuk pemberdayaan guna meningkatkan perekonomian serta mengurangi ketimpangan di Kota Malang.

4.1 Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU yang telah tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, seluruh BAZNAS, baik tingkat provinsi, kota maupun kabupaten, bersama Pemerintah memiliki bertanggung jawab untuk wajib mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan,

keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Jaringan BAZNAS telah tersebar diseluruh Indonesia dengan jumlah 34 cabang BAZNAS tingkat provinsi, 500 cabang BAZNAS tingkat kabupaten & kota, 18 Lembaga Amil Zakat Nasional serta 19 Lembaga Zakat Internasional.

Dalam lembaga resmi pemerintahan, BAZNAS tentunya memiliki memiliki visi, misi dan nilai dalam menjalankan tugasnya, yang mana visi, misi dan nilai tersebut menjadi panduan aktivitas dalam menjalankan program- program kinerja yang telah dibentuk guna memberdayakan masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun visi yang diusung oleh BAZNAS yaitu *“Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.”* dan misinya adalah:

1. Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.

8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

Selain itu, nilai-nilai yang dibawa BAZNAS dalam menjalankan programnya mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya yaitu:

1. Visioner
2. Optimis
3. Jujur
4. Sabar
5. Amanah
6. Keteladanan
7. Profesional
8. Perbaikan Berkelanjutan
9. Entreprenurial
10. Transformasional

Dalam menjalankan program-programnya, BAZNAS juga membentuk kebijakan mutu guna menjaga konsistensi dan komitmennya dalam mengelolamutu produk dan layanan yang telah dijalankan. Adapun kebijakan mutu yang telah dibentuk oleh BAZNAS yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

2. Memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik.
3. Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.
4. Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ.
5. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional.
6. Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
7. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
8. Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

Adapun tujuan mutu dari kebijakan mutu yang telah dibuat tersebut adalah:

1. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan
2. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
3. Menkuatkan kapasitas, kapabilitas dan tatakelolal BAZNAS dan LAZ
4. Menkuatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-

- pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
5. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja
 6. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109
 7. Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK
 8. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan

Selain itu, BAZNAS juga menjalankan empat (4) fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan yaitu, Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dan Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Sejak dibentuk dan disahkan undang-undangnya pada tahun 2011, BAZNAS telah meraih beberapa pencapaian antara lain, BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZNAS Provinsi

maupun BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI dan BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggungjawaban yang terkonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.

Gambar 4.1 Penghargaan BAZNAS

Sumber: BAZNAS, 2017

Selain beberapa pencapaian yang telah di raih tersebut, baznas juga memperoleh beberapa penghargaan yaitu, Tahun 2008 BAZNAS mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000, Tahun 2009, 2010 dan 2011 BAZNAS kembali berhasil

memperoleh sertifikat ISO, kali ini untuk seri terbarunya, ISO 9001:2008. BAZNAS adalah lembaga pertama yang memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk kategori seluruh unit kerja pada tahun 2009, Tahun 2009, BAZNAS juga mendapatkan penghargaan The Best Quality Management dari Karim Business Consulting, BAZNAS berhasil memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008, serta BAZNAS meraih “*The Best Innovation Programme*” dan “*The Best in Transparency Management*” pada IMZ Award 2011.

4.2 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Malang yang berkedudukan di daerah memberikan kontribusi kepada Negara dan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan ZIS.

Berdasarkan SK Walikota Malang Nomor : 188.45/ 221/ 35.73.112/ 2018 tentang: Penetapan Pimpinan BAZNAS Kota Malang periode 2018-2023 tertanggal 03 September 2018 serta dikukuhkan pada tanggal 03 Oktober 2018 oleh Bapak Walikota Malang dengan susunan pimpinan BAZNAS Kota Malang periode 2018-2023 sebagai berikut:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS

Sumber: BAZNAS, 2018

4.2.1 Dasar Hukum

1. Al Quran Surat At Taubah ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. UU No. 23 Th 2011 tentang Pengelolaan zakat;
3. UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 14 Th 2014 tentang Pengelolaan zakat;
5. Peraturan BAZNAS No. 3 Th 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

4.2.2 Visi & Misi BAZNAS Kota Malang

VISI :

Terjaganya petugas BAZNAS Kota Malang yang amanah dalam menghantarkan muzakki, mustahiq yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat.

MISI :

1. Membudayakan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) kepada masyarakat Kota Malang;
2. Meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa muzakki mustahiq dalam menghantarkan masyarakat Kota Malang yang *baldatun toyyibatun warabbun ghofur*;
3. Melaksanakan peran serta BAZNAS Kota Malang terhadap pemberdayaan dhu'afa fakir miskin yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik.
4. Menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang yang memiliki kemampuan integritas yang tinggi, efektif, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat Kota Malang;
5. Memberikan bantuan kepada mustahiq dan penanganan bencana

kemanusiaan maupun penanggulangan kemiskinan di Kota Malang

4.2.3 Tujuan & Sasaran BAZNAS Kota Malang

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan, serta taraf hidup fakir miskin dan dhu'afa yang lebih baik dan sejahtera;
- b. Menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang dalam pengumpulan, pendistribusian zakat infaq shadaqah yang tepat sasaran, efektif, transparan, dan akuntabel;
- c. Menjalin hubungan yang harmonis, sinergis antara BAZNAS Kota Malang (UPZ), Lembaga Pemerintah, lembaga Swasta maupun elemen masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dan kemanusiaan.

2. Sasaran

- a. ASN yang kurang mampu.
- b. Fakir miskin dan dhu'afa (mengacu 8 asnaf)
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian fakir miskin dan dhu'afa lahir dan bathinnya yang bersandar Iman dan Taqwa pada Allah SWT.

4.2.4 Program Kerja BAZNAS Kota Malang

1. Dakwah dan Advokasi

Suatu upaya dalam meningkatkan kualitas iman dan taqwa untuk menjadi insan yang terbaik, adapun bentuk program antara lain :

- a. Pencerahan Iman dan Taqwa maupun pelaksana amaliah.
- b. Memberikan bantuan fasilitas ibadah.

2. Ekonomi

Mendorong tumbuhnya kemandirian dalam meningkatkan kualitas hidup maupun menunjang ekonomi keluarga yang berkecukupan, adapun bentuk program antara lain :

- a. Memberikan saham untuk mengangkat perekonomian keluarga para mustahiq (fakir miskin dan dhu'afa).

3. Kemanusiaan

Menumbuhkan rasa kepedulian dalam mengangkat harkat, martabat dan pravailis pada masyarakat yang tidak mampu serta menggali potensi kearifan lokal untuk penanganan bencana kemanusiaan dan penanggulangan kemiskinan, adapun kegiatan antara lain :

- a. Renovasi/ bedah rumah yang tidak layak huni bagi para mustahiq(fakir miskin dan dhu'afa).

4. Kesehatan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tidak mampu, adapun kegiatan antara lain :

- a. Mengikutsertakan pada BPJS.
- b. Memfasilitasi bagi penyandang disabilitas.

5. Pendidikan

Mendukung program pendidikan untuk membentuk SDM yang berkarakter serta memiliki IPTEK yang dilandasi dengan IMTAQ, bentuk program antara lain :

- a. Menunjang siswa dari keluarga tidak mampu dengan memberi bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

4.2.5 Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di lingkungan kementerian atau lembaga, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), perusahaan swasta nasional, perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri. Tetapi, pada BAZNAS tingkat kota dan kabupaten, tugas UPZ sendiri untuk membantu pengumpulan zakat di area yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS itu sendiri. UPZ bentukan BAZNAS tingkat kota dan kabupaten mengurus pengelolaan zakat ditingkat kelurahan atau kecamatan.

Dengan demikian, UPZ merupakan bagian BAZNAS yang tak terpisahkan karena setiap transaksi atau segala macam pencatatan yang berkaitan dengan zakat, baik menyangkut hak maupun kewajiban, harus menjadi bagian dari catatan dan pelaporan serta tanggung jawab BAZNAS. Tugas dari UPZ adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan terkait

2. Memberi konsultasi zakat
3. Melakukan registrasi calon muzaki
4. Menerima kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari BAZNAS dan menyerahkan ke muzaki
5. Menyerahkan data muzaki dan perubahannya kepada BAZNAS
6. Menerima pembayaran zakat dan menyetorkan ke BAZNAS sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
7. Menerima Bukti Setor Zakat (BZS) dari BAZNAS dan menyerahkan ke muzaki
8. Membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara periodik
9. Mensurvey calon penerima bantuan (muztahiq)

Kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat yang dilaksanakan UPZ pada BAZNAS tingkat pusat atau provinsi dilakukan kepada pegawai atau karyawan dengan menggelar pertemuan secara berkala melalui kegiatan pengajian, acara pertemuan sosialisasi dan kegiatan lainnya. Sedangkan, UPZ pada BAZNAS tingkat kota atau kabupaten memiliki tugas yang sama yaitu sosialisasi dan edukasi zakat tetapi lebih ditujukan kepada masyarakat.

Pelaksana harian UPZ melakukan sosialisasi dan edukasi zakat menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di instansi atau perusahaan seperti papan informasi, *mailing list* dan

website serta menggunakan *marketing tools* seperti *leaflet*, majalah dan brosur.

C. Paparan Data Hasil Penelitian di BAZNAS Kota Malang

Sebelum menentukan program kerja yang tepat untuk mengatasi ketimpangan, BAZNAS Kota Malang, terlebih dulu melaksanakan penyusunan analisis lingkungan. Setelah tahapan perumusan selesai dilakukan, BAZNAS Kota Malang melalui rapat kerja kemudian memutuskan menerapkan program kerja apasaja yang nantinya efektif dan efisien dalam menghimpun maupun mendistribusikannya ZIS yang tepat sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada serta mereka yang membutuhkan, situasi dan kondisi lembaga, serta faktor pendukung lainnya seperti teknologi, perangkat media, dan lain-lain, yang mana hal tersebut diharapkan dapat menjadikan kesejahteraan yang merata dan mengurangi angka ketimpangan di Kota Malang.

a. Kondisi Perekonomian Kota Malang

Menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kota Malang tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang sangat kencang. Terutama, kota ini dijuluki sebagai kota pendidikan yang mana banyak sekali masyarakat-masyarakat dari luar Kota Malang berbondong-bondong untuk mengenyam pendidikan disini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari produk domestik bruto (PDB)

mencapai titik tertinggi pada 2012 lalu dengan angka 6,26 persen. Angka itu turun menjadi 6,20 persen pada 2013. Pertumbuhan ekonomi kembali anjlok pada 2014 hingga angka 5,80 persen dan berlanjut turun hingga 5,61 persen selama periode 2015 dan 2016. Tren positif mulai terlihat pada 2017 lalu dengan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi ke angka 5,69 persen. Meski meningkat secara perlahan, tren kenaikan itu berlanjut di 2018 pada angka 5,72 persen. Sumber perekonomian yang diperoleh di Kota Malang adalah dari Pengelolaan Dana PDB. PDB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak.

b. Kondisi Ekonomi Mustahiq

Kondisi ekonomi mustahiq adalah suatu keadaan dan kemampuan dimana para masyarakat cukup dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan, maupun kebutuhan sekunder seperti biaya sekolah anak, kelayakan tempat tinggal dan pekerjaan. Untuk mendapat gambaran

mengenai hal tersebut, akan diuraikan hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Ibu Sumiyatin, yang bertempat tinggal di Jalan Jakarta Dalam, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang juga sudah 29 tahun berprofesi sebagai penjual sate, yang biasanya berjualan di area SOB Ijen, menuturkan bahwa tidak mampu mencukupi kehidupan sehari-harinya, apalagi ditambah dengan adanya 2 cucu yang masih sekolah yang mana hal tersebut membutuhkan biaya pendidikan yang cukup besar. Beliau menuturkan bahwa:

“Pendapatan saya dulu tidak sampai Rp. 600.000,- ya karena keterbatasan modal yang saya punya ya sedikit, ditambah apabila ada dagangan yang belum terjual, kalau makanan kaya sate gini di makan besok kan ya gak enak, jadi saya bagikan ke karyawan STMJ SOB Ijen itu biasanya”

Penuturan tersebut mengungkapkan bahwa kurangnya modal yang tersedia membuat pedagang sulit untuk meningkatkan pendapatannya.

Beliau menuturkan bahwa sejak adanya bantuan dari BAZNAS Kota Malang, penjualan meningkat dan bertambah.

“Tapi sejak ada bantuan dari BAZNAS, Alhamdulillah penjualan saya jadi meningkat mbak, jadi banyak yang beli, kadang ada mahasiswa yang pesan sampai 3000 tusuk untuk acara di kampus gitu katanya”

Selain itu menerima bantuan program ekonomi, beliau juga menerima program bantuan kemanusiaan dari BAZNAS Kota Malang. Program tersebut diberikan karena terjadinya kebakaran akibat korsleting

listrik di rumah beliau yang menyebabkan separuh rumah habis di makan oleh api. Ibu Sumiyatin juga menuturkan apabila proses mengajukan dan penerimaan bantuan oleh BAZNAS Kota Malang sangat cepat dan mudah.

“prosedur bantuannya sangat mudah dan cepat mbak, tidak ribet, tapi syaratnya tidak boleh atau belum menerima bantuan dari lembaga lain.”

Selain Ibu Sumiyatin, ada juga Ibu Rusmini yang menerima bantuan kemanusiaan dari BAZNAS Kota Malang. Rumah beliau sudah hampir roboh dan tidak layak huni, apalagi bila sedang musim hujan.

Beliau menuturkan bahwa:

“Pendapatan saya yang hanya dari berjualan rokok dan kopi saja apabila membetulkan rumah saya belum mampu mbak, tapi alhamdulillah ada bantuan dari BAZNAS bulan September 2019 tahun kemarin”

Ibu Nurkhasanah, yang beralamat di Kacuk, Kelurahan Kebonsari Kota Malang. Beliau menerima bantuan dari program kemanusiaan dan ekonomi. Program kemanusiaan yang diterima berupa bedah rumah, yang mana rumah beliau sebelumnya tidak layak huni karena memiliki atap yang sudah bocor. Beliau juga mendapat bantuan program ekonomi yang berupa rombongan untuk berjualan serta tambahan modal untuk meningkatkan pendapatan. beliau berjualan mainan disekitar sekolah dasar di daerah Kebonsari. Beliau menuturkan bahwa:

“Dulu sebelum diberi bantuan oleh BAZNAS sempat diberi bantuan oleh warga juga, kami (ibu Nurkhasanah dan

suami) hanya dapat maksimal Rp. 30.000 seharinya dari jualan mainan ya karena modal untuk beli mainan yang lain masih kurang mbak. Sekarang alhamdulillah sejak ada bantuan dari BAZNAS bisa minimal pendapatan sehari kami Rp. 70.000,-“

Selain memberikan tambahan modal, BAZNAS Kota Malang juga memberikan sebuah gerobak untuk pedagang yang berjualan keliling. BAZNAS membuat gerobak dengan kualitas yang baik serta awet dan tahan lama. Selain itu, juga lebih ringan apabila didorong karena berbahan dasar alumunium.

Dalam pelaksanaan pengerjaan program kemanusiaan bedah rumah, BAZNAS Kota Malang memilih & menggunakan bahan-bahan yang awet dan tahan lama, seperti pada atap, mereka menggunakan kerangka berbahan dasar galvalum. Bahan tersebut anti rayap dan anti karat yang mana bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama.

c. Isu-Isu Internal

1. Penguatan fondasi BAZNAS Kota Malang

Penguatan fondasi yang meliputi aspek lembaga dan kepemimpinan yang sesuai dengan syari'ah dalam pengelolaan ZIS yang akuntabilitas, amanah, kredibilitas, transparan dalam pengumpulan dan penyaluran ZIS secara baik.

2. Pengelolaan ZIS yang terintegrasi

Dilingkungan dan wilayah Kota Malang integrasi pengelolaan ZIS di lingkungan Kota Malang dilakukan dengan cara konvensional dan pemanfaatan IT yang dapat diakses dengan mudah, cepat, dan efisien.

3. Keberpijakan Pada Syari'ah

Pengelolaan ZIS sangat erat dengan aturan-aturan syari'ah. Oleh karena itu dalam pengelolaan dan pendistribusian ZIS dengan segala perkembangan dan inovasi, harus mengacu pada ketentuan syari'ah, sebagian dasar dan pedoman yang harus diikuti (dipatuhi).

a. Isu-Isu Eksternal

Sedangkan isu-isu external strategi BAZNAS Kota Malang meliputi :

1. Kesenjangan Sosial

Dana ZIS yang terkumpul dan terus tambah dari para muzakki. Dermawan mempunyai nilai serta berkontribusi untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial yang muncul di Kota Malang. Penanganan yang tepat sasaran dengan keberhasilan akan memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam menjaga stabilitas yang lebih kondusif di Kota Malang sekaligus peningkatan kesejahteraan bagi mustahiq (dhu'afa/ Fakir Miskin).

2. Sinergitas BAZNAS Kota Malang dengan Institusi Keagamaan, Lembaga Pemerintah dan swasta maupun masyarakat dalam membantu penanganan kemanusiaan dan kemiskinan.

BAZNAS Kota Malang sebagai Lembaga Pemerintah non struktural senantiasa bersinergi dan berkolaborasi maupun bekerja sama dengan Institusi keagamaan, Lembaga Pemerintah, maupun masyarakat dalam pemangku kepentingan yang terkait pengentaskan kemiskinan maupun dalam membantu penanganan kemanusiaan.

3. Meningkatkan kualitas IPTEK dan IMTAQ

Jenjang Pendidikan yang rendah dan keimanan serta ketaqwaan yang kurang menyebabkan mental para dhu'afa fakir miskin menjadi lemah dalam mengangkat harkat martabat harga dirinya. Dengan pembinaan dan pendekatan mental spiritual, guna meningkatkan suatu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas jati diri agar berdaya dan mandiri. Tidak menjadi beban, sebagai pilar dalam meningkatkan kesejahteraan dalam mencukupi kebutuhan hidup.

D. Rencana Strategi BAZNAS Kota Malang Tahun 2018-2023

1. Rencana kerja BAZNAS Tahap Akhir 2018

- a. Penyusunan personil kepengurusan di struktur BAZNAS.
- b. Penyusunan program kerja BAZNAS melalui pembuatan DPA Th 2018(APBD).
- c. Konsolidasi dan koordinasi lintas sektor tentang program kerja BAZNAS.
- d. Pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan ZIS Th 2018.
- e. Penyusunan DPA Th 2019.
- f. Evaluasi dan pelaporan.

2. Rencana kerja BAZNAS Th 2019

- a. Realisasi DPA Th 2019.

-
- b. Pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan ZIS Th 2019.
 - c. Pembentukan UPZ dalam bagian pemerintah, lembaga sosial,
 - d. Penyusunan DPA Th 2020 melalui APBD.
 - e. Konsolidasi dan koordinasi lintas sektor tentang program kerja BAZNAS.
 - f. Pendataan muzakki dan mustahiq melalui SIMBA.
 - g. Pembuatan peta kemiskinan/ mustahiq.
 - h. Sosialisasi dan pembinaan wilayah bebas mustahiq.
 - i. Evaluasi dan pelaporan.
3. Rencana kerja BAZNAS Th 2020
- a. Realisasi DPA Th 2020.
 - b. Pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan ZIS BAZNAS Th 2020.
 - c. Pembentukan UPZ di Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta, organisasikeagamaan masjid.
 - d. Pembinaan kerja UPZ, koordinasi atau konsolidasi sinergi program.
 - e. Pendataan muzakki, muztahiq melalui aplikasi SIMBA.
 - f. Penyusunan DPA Th 2021.
 - g. Pemetaan skala prioritas penanganan kemiskinan
 - h. Konsolidasi dan koordinasi mustahiq lintas sektor tentang penanganan kemiskinan.
 - i. Sosialisasi dan pembinaan wilayah bebas mustahiq.
 - j. Evaluasi dan Pelaporan.

4. Rencana kerja BAZNAS Th 2021
 - a. Realisasi DPA 2021.
 - b. Pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan ZIS Th 2021.
 - c. Pemantapan sinergi program dan penguatan kelembagaan BAZNAS.
 - d. Pendataan muzakki dan mustahiq melalui aplikasi SIMBA.
 - e. Pembentukan UPZ.
 - f. Konsolidasi dan koordinasi program lintas sektor tentang penanganan kemiskinan.
 - g. Pembinaan dan penguatan SDM di wilayah bebas mustahiq.
 - h. Penyusunan DPA Th 2022.
 - i. Evaluasi dan pelaporan.
5. Rencana kerja BAZNAS Th 2022
 - a. Realisasi DPA Th 2022.
 - b. Pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan ZIS Th 2022.
 - c. Sinergi program lintas sektor tentang kemiskinan/ mustahiq.
 - d. Pemetaan wilayah kerja garapan dalam pengentasan kemiskinan.
 - e. Pendataan muzakki dan mustahiq melalui SIMBA.
 - f. Pembinaan dan pengembangan wilayah bebas mustahiq.
 - g. Penyusunan DPA 2023.
 - h. Evaluasi dan pelaporan.

6. Rencana kerja BAZNAS Th 2023
 - a. Realisasi DPA Th 2023.
 - b. Pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan ZIS Th 2023.
 - c. Pengembangan dan pementapan SDM wilayah bebas mustahiq.
 - d. Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Penyusunan pertanggung jawaban pengurus BAZNAS masa bakti 2018-2022

I. Program Kerja dan Kegiatan BAZNAS Kota Malang Tahun 2018

A. Penataan Kelembagaan dan Birokrasi BAZNAS Kota Malang

1. Struktur organisasi BAZNAS.
2. Kelengkapan kelembagaan BAZNAS Kota Malang UPZ.
3. Manajemen dan keuangan BAZNAS.
4. Sarana dan prasarana BAZNAS.

B. Pengumpulan ZIS

1. Aparatur Negara
2. Lembaga Pemerintah dan swasta, organisasi kemasyarakatan.
3. Muzakki.
4. Munfiq.
5. Aghniya'.

C. Pendistribusian ZIS

1. Bidang kemanusiaan dan avokasi

- a. Santunan kematian bagi keluarga ASN Pemerintah Kota Malang.
- b. Bantuan pengobatan bagi ASN rawat inap.
- c. Perbaikan/ bedah rumah ASN dan fakir miskin dan dhu'afa.
- d. Khitanan massal bagi keluarga fakir miskin dan dhu'afa.
- e. Nikah massal bagi fakir miskin dan dhu'afa.
- f. Perbaikan tempat ibadah.
- g. Peningkatan kualitas Iman dan Taqwa melalui pengajian

2. Bidang konsumsi

- a. Bantuan biaya hidup lansia.
- b. Peningkatan kesejahteraan fakir miskin dan dhu'afa melalui pemberian santunan, bahan-bahan pokok, dsb.
- c. Pemberian bantuan pada fakir miskin dan dhu'afa yang memiliki anak kurang gizi.

3. Bidang kesehatan

- a. Pemberian bantuan pada ASN yang rawat inap.
- b. Pemberian bantuan pengobatan fakir miskin dan dhu'afa melalui keikutsertaan pada BPJS.
- c. Kegiatan pengobatan gratis dan layanan kesehatan.

4. Bidang pendidikan

- a. Pelatihan dan keterampilan bagi fakir miskin dan dhu'afa

disesuaikan dengan kebutuhan dalam meningkatkan taraf hidup.

b. Pembinaan mental dan spiritual dari fakir miskin dan dhu'afa melalui pemberian santunan yatim dan piatu.

5. Bidang produktif

a. Pemberdayaan mustahiq (fakir miskin dan dhuafa) melalui pemberian modal usaha kerja (saham) untuk mandiri mencukupi kebutuhannya.

b. Pemberian subsidi berupa saham pada ekonomi produktif yang menggunakan pekerja para mustahiq (fakir miskin dan dhuafa) untuk meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan.

c. Menyiapkan sarana dan prasarana usaha mustahiq (fakir miskin dan dhuafa).

II. Program Kerja dan Kegiatan BAZNAS Kota Malang Tahun 2019

A. Penataan Kelembagaan dan Birokrasi BAZNAS Kota Malang

1. Struktur organisasi BAZNAS.
2. Kelengkapan kelembagaan BAZNAS Kota Malang UPZ.
3. Manajemen dan keuangan BAZNAS.
4. Sarana dan prasarana BAZNAS.

B. Pengumpulan ZIS

1. Aparatur Negara.

2. Lembaga Pemerintah dan swasta, organisasi kemasyarakatan.
3. Muzakki.
4. Munfiq.
5. Aghniya'.

C. Pendistribusian ZIS

1. Bidang kemanusiaan dan advokasi

- a. Santunan kematian bagi keluarga ASN Pemerintah Kota Malang
- b. Bantuan pengobatan bagi ASN rawat inap.
- c. Perbaikan/ bedah rumah ASN dan mustahiq (fakir miskin dan dhu'afa) dalam bentuk atap dan plafon (Apon).
- d. Khitanan massal bagi keluarga mustahiq (fakir miskin dan dhu'afa).
- e. Nikah massal bagi mustahiq (fakir miskin dan dhu'afa).
- f. Perbaikan tempat ibadah.
- g. Peningkatan kualitas Iman dan Taqwa melalui pengajian dsb.

2. Bidang konsumsi

- a. Bantuan pemberian saham untuk biaya hidup lansia.
- b. Peningkatan kesejahteraan mustahiq (fakir miskin dan dhu'afa) melalui pemberian santunan berupa saham untuk

mereka, bahan-bahan pokok bagi mustahiq.

- c. Pemberian bantuan berupa makanan pada mustahiq (fakir miskin dan dhu'afa) yang memiliki anak kurang gizi.

3. Bidang kesehatan

- a. Pemberian bantuan pada ASN yang rawat inap ataupun alat bantuan disabilitas.
- b. Pemberian bantuan pengobatan para mustahiq (fakir miskin dan dhu'afa) melalui keikutsertaan pada BPJS.
- c. Kegiatan pengobatan gratis dan layanan kesehatan pada mustahiq.

4. Bidang pendidikan

- a. Pelatihan dan keterampilan bagi para mustahiq (fakir miskin dan dhu'afa) disesuaikan dengan kebutuhan dalam meningkatkan taraf hidup.
- b. Pembinaan mental dan spiritual para mustahiq (fakir miskin dan dhu'afa) melalui pemberian santunan berupa saham yatim dan piatu.

5. Bidang produktif

- a. Pemberdayaan mustahiq (fakir miskin dan dhu'afa) melalui pemberian modal usaha kerja (saham) untuk mandiri mencukupi kebutuhannya.
- b. Pemberian subsidi berupa saham pada ekonomi produktif yang menggunakan pekerja para mustahiq

(fakir miskin dan dhuafa) untuk meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan.

- c. Menyiapkan sarana dan prasarana usaha mustahiq (fakir miskin dan dhuafa).

E. Upaya Pemerataan Kesejahteraan Guna Mengurangi Ketimpangan

Sebagai bentuk realisasi atas pemberdayaan masyarakat dalam usaha pemerataan kesejahteraan guna mengurangi ketimpangan, program-program kerja yang dibentuk BAZNAS Kota Malang, mengacu pada tiga teori yakni membangkitkan (*enabling*), memberikan semangat dan memotivasi (*empowering*), dan perlindungan (*protection*).

Ketiga teori dasar tersebut BAZNAS Kota Malang terapkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam usaha pemerataan kesejahteraan guna mengurangi ketimpangan seperti:

4.3 Program Membangkitkan (*Enabling*)

BAZNAS Kota Malang memiliki program Ekonomi yang mana program tersebut bertujuan untuk membangkitkan kualitas hidup para mustahiq dalam sektor ekonomi untuk mencapai kehidupan yang layak dan berkecukupan. Bentuk dari bantuan yang disalurkan BAZNAS Kota Malang antara lain berupa saham atau bantuan modal yang digunakan mustahiq untuk meningkatkan pendapatan sehari-hari. Selain itu, BAZNAS Kota Malang juga menyalurkan bantuan berupa fasilitas seperti gerobak untuk berkeliling menjajakan dagangannya. BAZNAS Kota Malang juga bekerja sama dengan BPR Tugu Artha

dengan program ojrnya guna mengurangi prakter rentenir yang telah menjamur dan menyusahkan masyarakat.

4.4 Program Memotivasi (*Empowering*)

BAZNAS Kota Malang memiliki program yang bertujuan untuk memompa semangat dan motivasi masyarakat penerima manfaat ZIS adalah dakwah dan advokasi. Program tersebut memiliki 2 kegiatan yaitu meliputi, pencerahan iman dan taqwa maupun pelaksana amaliah dan memberikan bantuan fasilitas ibadah. Dengan adanya program tersebut, para masyarakat yang menerima manfaat diharapkan agar selalu termotivasi untuk beribadah dan selalu mengingat Allah SWT. Selain itu program dakwah dan advokasi, BAZNAS Kota Malang memiliki program pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan lagi semangat mereka yang telah putus sekolah karena terbatasan biaya. Program tersebut juga bertujuan untuk mendukung program pendidikan untuk membentuk SDM yang berkarakter yang memiliki IPTEK yang dilandasi IMTAQ.

4.5 Program Perlindungan (*Protection*)

BAZNAS Kota Malang memiliki bantuan kemanusiaan, yang mana program tersebut bisa membantu siapa saja, misalnya mereka yang sedang sakit dan tidak memiliki cukup biaya. Dalam hal tersebut, BAZNAS Kota Malang juga bekerja sama dengan Rumah Sehat BAZNAS. BAZNAS Kota Malang juga membagikan kursi roda gratis bagi mereka yang membutuhkan dan membagikan makanan

gratis sebanyak dua kali sehari untuk mereka yang sudah tidak mampu bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, BAZNAS Kota Malang memiliki program untuk penanggulangan bencana seperti korban kebakaran dalam bentuk bantuan bedah rumah.

Dalam proses pembentukan program kerjanya, BAZNAS Kota Malang, memiliki dua target untuk pelaksanaannya. Ada target jangka panjang dan target jangka pendek. Target jangka pendeknya antara lain yaitu membiayai renovasi yang diakibatkan oleh bencana yang tidak bisa dibiayai oleh pemerintah, secepat mungkin melakukan aksi setelah mendapat laporan jika ada yang membutuhkan bantuan dan memudahkan surat-surat administrasi untuk masyarakat penerima bantuan agar dana bantuan cepat sampai dan dipergunakan.

Selain itu, target jangka panjang yang mereka rancang adalah mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sebanyak 1% dari data yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam proses menjangkau dan mencari masyarakat yang membutuhkan bantuan, BAZNAS Kota Malang telah membentuk Unit Pelayanan Zakat (UPZ) di beberapa wilayah di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Malang. UPZ juga bertugas mencatat dan mendata pendapatan ZIS dari masyarakat sekitar untuk diserahkan kepada BAZNAS. UPZ juga menentukan kriteria masyarakat seperti apa dan bagaimana yang layak dan patut menerima bantuan dari BAZNAS

F. Temuan Penelitian

Zakat merupakan bagian dari instrumen pengentasan kemiskinan yang

mana memiliki 2 sisi, yaitu sisi spiritual dan material. Zakat bertujuan tidak lain untuk menghindari eksploitasi yang ada dalam masyarakat dengan cara pengentasan kemiskinan dan pencegahan ketimpangan (disparitas). Konsep Zakat memaparkan (a) pemahaman bahwa kekayaan dan pendapatan yang hanyalah titipan dari Allah SWT kepada hambaNya dan (b) manfaat dari nilai-nilai spiritual dan aliran material tersebut berimplikasi, secara resiprokal, dari pemberi (muzakki) ke penerima (mustahik) dan sebaliknya. Perbedaan kekayaan dan pendapatan sudah pasti sulit untuk dihindari. Akan tetapi, ketimpangan ekonomi yang semakin membesar dapat mengganggu dan menyebabkan kemiskinan serta krisis ekonomi multidimensional.⁴²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi BAZNAS Kota Malang dalam dua fokus yaitu bagaimana strategi lembaga tersebut dalam mengatasi ketimpangan dan bagaimana dampak dari strategi ke masyarakat penerima bantuan. Setelah melakukan penelitian studi kasus di lapangan serta melalui hasil observasi, wawancara, dan melihat dari dokumentasi kelembagaan BAZNAS Kota Malang, ada beberapa hal yang sangat penting yaitu:

1. BAZNAS Kota Malang mengalami perubahan kepengurusan pada Oktober 2018 yang juga mengakibatkan perubahan pada program kerja. Pada periode baru yang sekarang ini, BAZNAS Kota Malang lebih memfokuskan pendistribusian zakat dalam bentuk produktif atau pemberdayaan ekonomi yaitu sebesar 70% dari total keseluruhan pendapatan zakat serta sisanya 30% digunakan untuk pendistribusian

⁴² Athoilah Muhammad. 2014. Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa. Media Syariah Vol XVI No 1.

yang bersifat konsumtif.

2. Penghimpunan zakat 98% diperoleh dari ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mana pegawai pemerintahan yang beragama muslim tersebut wajib mengeluarkan zakat nishabnya. BAZNAS Kota Malang juga menjangring muzakki melalui kampanye sosial media dan aksi kinerja yang nyata guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS.

Pada tahun 2019, dalam dua semester, BAZNAS dan UPZ telah menghimpun Infak dan shodaqoh sebanyak Rp. 1.122.127.726,00 pada semester 1 dan Rp. 1.572.428.277,00 pada semester 2.

Tabel. 4.1 Penghimpunan Infak dan Shodaqoh Semester 1 tahun 2019

No	Bulan	Infak& Shodaqoh	
1	Januari	Rp	200.000,00
2	Februari	Rp	213.134.785,00
3	Maret	Rp	90.094.909,00
4	April	Rp	323.555.572,00
5	Mei	Rp	274.211.438,00
6	Juni	Rp	220.931.022,00
	Jumlah	Rp	1.122.127.726,00

Tabel. 4.2 Penghimpunan Infak dan Shodaqoh Semester 2 tahun 2019

No	Bulan	Infak& Shodaqoh	
1	Juli	Rp	238.885.240,00
2	Agustus	Rp	225.134.444,00
3	September	Rp	216.702.381,00
4	Oktober	Rp	226.505.719,00
5	November	Rp	223.829.068,00
6	Desember	Rp	441.371.425,00
	Jumlah	Rp	1.572.428.277,00

Selain itu, untuk penghimpunan zakat, BAZNAS memperoleh sebesar Rp. 253.461.272 di semester pertama dan sebesar Rp. 373.826.656,00 di semester ke 2.

Tabel. 4.3 Penghimpunan zakat Semester 1 tahun 2019

No	Bulan	Zakat	
1	Januari	Rp	50.557.857
2	Februari	Rp	58.620.743
3	Maret	Rp	53.969.983
4	April	Rp	58.777.971
5	Mei	Rp	29.114.859
6	Juni	Rp	2.419.859
	Jumlah	Rp	253.461.272

Tabel. 4.4 Penghimpunan zakat Semester 2 tahun 2019

No	Bulan	Zakat	
1	Juli	Rp	105.648.634,00
2	Agustus	Rp	63.221.998,00
3	September	Rp	38.890.000,00
4	Oktober	Rp	3.209.859,00
5	November	Rp	106.465.306,00
6	Desember	Rp	56.390.859,00
	Jumlah	Rp	373.826.656,00

3. Dalam pelaksanaan programnya, BAZNAS Kota Malang dibantu oleh UPZ (Unit Pengelola Zakat) untuk memperoleh data mustahiq, laporan pendapatan dan pengeluaran zakat. UPZ dibentuk langsung oleh BAZNAS guna memudahkan penyaluran bantuan dan mendapat informasi apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Karena, apabila UPZ sudah mengecek kondisi kelayakkan calon mustahiq yang akan mendapat bantuan, maka BAZNAS tidak perlu mengecek ulang dan hanya tinggal menyalurkan bantuannya saja. Selain itu, UPZ juga

bertugas membagikan kotak donasi kepada mustahiq untuk diisi seikhlasnya, kotak tersebut berguna untuk melatih dan membiasakan diri untuk selalu beramal berapapun nominalnya. Nantinya, hasil dari kotak amal tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan BAZNAS tidak mengambil sepeserpun dari sana.

BAB V

PEMBAHASAN

Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap narasumber serta dilengkapi dengan beberapa data dokumentasi serta data keuangan yang penulis dapatkan, maka pada bab ini dilanjutkan dengan memaparkan deskripsi umum tentang temuan hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi BAZNAS Kota Malang dalam meminimalisir ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari pokok-pokok hasil temuan penelitian, penulis akan melakukan analisis pembahasan hasil yang terkait dengan fokus penelitian. Analisis ini dilakukan sesuai dengan fakta dan apa saja yang ditemukan di lapangan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya lalu mencoba membandingkan dengan konsep dan teori mengenai strategi lembaga zakat dalam penanganan ketimpangan atau usaha pemerataan dalam bentuk secara umum. Selanjutnya penulis memfokuskan pembahasan sesuai tujuan penelitian yakni menelaah dan mengetahui strategi BAZNAS Kota Malang dalam mengurangi ketimpangan dari program-program kerja yang dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat.

5.1 Strategi BAZNAS Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

1. Implementasi Program Kerja Sesuai Dengan Manajemen Strategi Syariah.

Program-program yang dibentuk oleh BAZNAS tidak hanyadirancang untuk berorientasi pada urusan dunia saja, tetapi juga harus memperhatikan target atau rencananya dalam jangka panjang atau akhirat. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr Ayat 18 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Selain itu, BAZNAS Kota Malang juga memiliki tujuan kemaslahatan dan maqashi syariah yang terkandung dalam visi & misi yang telah dirancang. Dalam melaksanakan tujuan maqashid syariah yang dimaksud adalah untuk kebutuhan masyarakat secara umum. Sedangkan cara untuk mencapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan hajiyat (sekunder), dan Tahsiniat (tersier). Seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Yang artinya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Dalam menentukan visi dan misinya, BAZNAS Kota Malang berdasar pada niat berdakwah untuk menyampaikan sekaligus memperkenalkan ekonomi syariah kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas iman, taqwa dan taraf hidup fakir miskin dan kaum dhu’afaagar lebih sejahtera. Pada dasarnya visi merupakan salah satu hal yang penting dalam setiap organisasi, visi merupakan jati diri suatu organisasi, akan dibawa kemanakah suatu organisasi dapat dilihat dari visi organisasi tersebut.⁴³

Seperti visi yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang yaitu “Terjaganya petugas BAZNAS Kota Malang yang amanah dalam menghantarkan muzakki, mustahiq yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat.”. visi tersebut menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Malang memiliki cita-cita menjadi lembaga yang mampu menjadikan masyarakat yang sejahtera dan perlahan mengubah mustahiq menjadi muzakki.

⁴³ Muhammad Niltal Muna & Meri Indri Hapsari. 2015. Implementasi Manajemen Strategik Syariah Di Bmt Amanah Ummah. Jestt Vol. 2 No. 12 Desember.

Selain itu, misi yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang, yang sudah tercantum pada bab sebelumnya, dibuat berlandaskan dakwah serta kebutuhan masyarakat. BAZNAS Kota Malang juga memiliki target jangka panjang yaitu terciptanya lingkungan yang bebas dari pengangguran dan mengentaskan kemiskinan sebesar 1% dari data yang sudah diterbitkan oleh BPS. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Faiza Milati, bagian keuangan mengatakan

“Tugas kami memang membantu pemerintah menekan angka ketimpangan, biasanya sebanyak 1% dari data yang sudah dikeluarkan BPS, tetapi kadang yang miskin itu bukan harta mereka tetapi mental mereka. Sudah dikasih bantuan jadi suka menggantungkan bukannya malah berusaha agar lebih baik ada juga yang sudah menerima bantuan dari lembaga lain tetapi, jadi dia dapat double gitu. Hal yang seperti itu yang menghambat program kerja kita, yang harusnya bisa tersalurkan ke lebih yang membutuhkan”

2. Pemaksimalan Pelaksanaan Program Kerja

Zakat tidak dapat disalurkan ke sembarang orang, karena Islam sendiri memiliki aturan dalam penyalurannya. Mustahiq adalah mereka yang disebut 8 ashnaf atau golongan masyarakat yang berekonomi sangat rendah yang berhak menerima bantuan zakat. Sesuai yang tercantum pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dalam pelaksanaan programnya, BAZNAS Kota Malang memfokuskan pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Untuk memaksimalkan program kerja agar tepat sasaran, maka ada beberapa kategori miskin yang telah dikemukakan oleh Yusuf Qaradhawi sebagai berikut:

- a. Kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang mana hal tersebut menyebabkan sulit untuk mencari nafkah, pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang dalam miskin kategori ini adalah bantuan kesehatan berupa kursi roda, bedah rumah serta catering yang diserahkan sehari sebanyak 2 kali makan.
- b. Keterbatasan mencari pekerjaan yang akibat keterbatasan akses. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Malang telah menyalurkan beasiswa untuk menunjang pelajar dari keluarga yang tidak mampu dengan memberi sarana dan prasarana pendidikan. Yang mana jika telah menyelesaikan pendidikan, siswa tersebut dapat mendapat pekerjaan yang layak.

c. Kemiskinan pada keluarga yang berpenghasilan tapi tidak tercukupi.

Pada kategori tersebut, BAZNAS Kota Malang memiliki program yang disebut program bantuan ekonomi. Program tersebut dibentuk guna mendorong tumbuhnya kemandirian dalam meningkatkan kualitas hidup serta menunjang ekonomi keluarga. Bentuk bantuan program berupa rombongan untuk berjualan serta tambahan modal untuk meningkatkan pendapatan sehari-hari.

BAZNAS Kota Malang fokus pada penyaluran ZIS yang bersifat produktif. Akan tetapi, bukan berarti mereka memfokuskan penyaluran ZIS yang bersifat produktif lalu yang bersifat konsumsi dikesampingkan, mereka membaginya dengan jumlah prosentase 70% disalurkan untuk ZIS produktif dan sisanya sebesar 30% dari hasil pendapatan disalurkan sebagai ZIS konsumtif

Tabel 5.1 Penerima dana ZIS produktif BAZNAS Kota Malang

Bentuk bantuan dana ZIS	Jumlah Bantuan	Nama Mustahiq	Asnaf
Bantuan Modal Usaha	Rp 1.000.000	Ibu Uminah	Miskin
Bantuan Dana untuk Usaha Tahu	Rp 500.000	Sumali	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Sumartin	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Sunarsih	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Achmad	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Sumali	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Rochman	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Sulastrri	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Samino	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Kusno Hari P.	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Witoyo	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Elvan Muljianto	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Endrowati	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Andhika Putri N	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Machmudah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Limah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Surachman	Miskin

Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Resmiwati	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Yahman	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Puji Triwahyuni	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Susilo	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Mutmainah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Seneman	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Nurhasanah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Ashari	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Sri Harnanik	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Moh. Romli	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Yuli Harianto	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Arifin	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	M. Yusuf	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Isrofi	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 7.000.000	Sakur	Miskin
Bantuan Dana untuk Peralatan Tambal Ban	Rp 7.500.000	Yanto	Miskin
Bantuan Dana untuk Catering Berkah	Rp 450.000	Saimin	Fakir
Bantuan Dana untuk Catering Berkah	Rp 450.000	Poniti	Fakir
Bantuan Dana untuk Ternak Kambing	Rp 7.500.000	Ponimin	Miskin
Bantuan Dana Bidang Ekonomi	Rp 20.000.000	Fauzi	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 150.000	Suyati	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 180.000	Endang Tunik	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 240.000	Yeni Susanah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Sherly Ika Purboasih	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 100.000	Sunanik Indrawati	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 180.000	Riamah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Sri Retno Rahayu	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Supiyah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Aris Febriliyanto	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Sukatemi	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Susianah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Riamah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 100.000	Sri Suryani	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Sunariati	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Sumiati	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 450.000	Susianah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Nanang Eko Lukito	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Shirly Istiqomah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 450.000	Sugiyati	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 120.000	Gimah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Sujadno Suprayogi	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 240.000	Tutik Rumiati	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Sri Dewi Asmarani	Miskin

Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Siti Romlah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Heny Kristiningsih	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 450.000	S. Anik Boedi P	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 240.000	Sri Marwiyah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 450.000	Endah Purwati	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Sukarniatun	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 450.000	Mistiyanti	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 450.000	Bramuli Septin R	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 240.000	Sarti	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Dendik Purnamasari	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 315.000	Siti Fatimah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 240.000	Sawirti Hidayati	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Rita Lilik Dwi Astuti	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 240.000	Darsini	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 100.000	Indrawati	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Siti Aisyah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 240.000	Yulianti	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Diana Agustin	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 300.000	Satimah	Miskin
Bantuan Modal Usaha	Rp 360.000	Hendrawati	Miskin

Sumber: BAZNAS Kota Malang, 2019

Zakat produktif dipilih untuk diutamakan karena zakat tersebut tidak hanya membantu untuk kebutuhan sehari-hari dan menjadikan para mustahiq menjadi masyarakat yang mandiri secara finansial tetapi mereka juga bisa pelan-pelan merubah dirinya menjadi muzakki yang mana hal tersebut juga dapat menurunkan angka kemiskinan yang dapat meminimalisir ketimpangan. Mengenai implementasi program ekonomi dapat dipaparkan sebagai berikut, yaitu sarana usahadibagikan dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan kemampuan wirausaha yang dimiliki oleh mustahiq.

BAZNAS Kota Malang telah mengucurkan dana sebesar 2,2 milyar untuk program tersebut, jumlah itu tersebut diperoleh dari infak shadaqah yang dikeluarkan oleh 5.000 pegawai negeri sipil (PNS) di

lingkungan Pemerintah Kota Malang. Bentuk-bentuk sarana usaha yang diberikan BAZNAS Kota Malang antara lain yaitu berupa rombongan untuk berjualan, mesin kompresor untuk tambal ban, mesin jahit bagi merekayang mempunyai keahlian menjahit serta BAZNAS Kota Malang juga telah menyalurkan hewan ternak bagi mereka yang hanya memiliki kemampuan beternak. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu penerima manfaat dari BAZNAS Kota Malang adalah Ibu Nurkhasanah, penjual mainan yang bertempat tinggal di Kelurahan Kebonsari, Kacuk. Beliau menuturkan bahwa:

“Rombongan yang diberikan oleh BAZNAS lebih ringan apabila didorong, Alhamdulillah penghasilan juga meningkat karena rombongan yang diberikan bisa membawa cukup banyak barang dagangan. Pengurusan juga mudah dan cepat”

Beliau berjualan mainan bersama suaminya mulai sekitar pukul 6 pagi hingga 12 siang yang bertempat di sekolah dasar di daerah Kebonsari.

Program ekonomi yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Malang juga memiliki fungsi lain yaitu mengurangi praktek rentenir. Praktek rentenir yang menjamur menjamur di pasar-pasar di KotaMalang sangat sulit dihilangkan karena para pedagang sudah terlanjur ketergantungan kepada mereka. Praktek rentenir Seperti yang dikatakan oleh Ibu Faiza Milati, bagian keuangan BAZNAS Kota Malang:

“Saya menjamin 100% bahwa tidak ada satupun pedagang-pedagang pasar di Kota Malang yang tidak terjerat hutang rentenir. Missal, seorang pedagang meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000-. Rentenir menyerahkan sebesar Rp. 800.000,- dan pengembaliannya bisa sampai sejumlah Rp. 1.500.000 hingga Rp. 2.000.000, bunganya (riba) seperti beranak-pinak, kadang-kadang juga ada pinjaman yang belum lunas sudah mengajukan pinjaman lagi, bisa-bisa si peminjam uang sampai menjual rumahnya hanya untuk membayar hutang. Karena saking mudahnya meminjam ke rentenir tanpa persyaratan & jaminan apapun, termasuk KTP saja tidak. Para pedagang menyebut rentenir itu macam-macam, ada yang BRI, Bank Rodok Isuk. Ada juga yang disebut BCA, Bank Cicilan Awan.”

Selain tidak sesuai hukum dan menyimpang dari ajaran agama islam, praktek-praktekrentenir tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan ekonomi masyarakat, karena membuat masyarakat yang miskin semakin miskin akibat cicilan hutang dengan bunga yang terus meningkat, sedangkan yang kaya semakin kayahnya dengan menanti para peminjam membayar hutang dengan bunga yang tinggi tersebut.⁴⁴ Akibatnya, ketimpangan terus terjadi akibat adanya praktek rentenir ini.

Pada bulan Desember tahun 2019 lalu, BPR Tugu Artha dan BAZNAS Kota Malang serta didukung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama-sama secara resmi melaunching Program Ojir yang mana program tersebut dapat membantu masyarakat sehingga terbebas dari jerat rentenir.

⁴⁴Niken Larasati. 2013. Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang Dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang. Universitas Airlangga.

Program Ojir dibentuk untuk menyediakan pelatihan dan modal unggulan, baik sebagai kredit yang bebas bunga ataupun sebagai bantuan bagi mereka yang ingin membuat usaha kecil-kecilan sehingga dapat mandiri secara ekonomi.

3. Peran & Kontribusi UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

BAZNAS Kota Malang berupaya untuk makin memudahkan masyarakat beribadah zakat melalui berbagai *platform digital*. Sedangkan bagi mustahik, BAZNAS membuat program & fasilitas yang mudah diakses dan menjadi solusi permasalahan mereka. UPZ merupakan salah satu fasilitas atau wadah yang disediakan oleh BAZNAS yang mana berguna untuk terjun langsung ke masyarakat dan mengetahui kondisi yang sebenarnya agar bantuan ZIS segera tersalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan..

UPZ juga dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan ZIS sehingga manfaat ZIS dapat meningkat. Dengan adanya peningkatan manfaat ZIS tersebut akan mendorong kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, lewat program bantuan ekonomi, UPZ menargetkan terciptanya sebuah wilayah yang bebas pengangguran, dengan cara memfasilitasi masyarakat sesuai dengan kemampuan & keahlian yang dimiliki mereka. Seperti kata Ketua UPZ Kelurahan Kebonsari menuturkan:

“Kami memberi bantuan sesuai masyarakat bisanya apa. Kalau mereka bisanya menjahit, kami fasilitasi mesin jahit.

Kapan hari ada seorang mustahiq yang dia hanya bisa tambal ban, ya kami fasilitasi mesin kompresor. Terus di daerah Arjowinangun itu ada bapak-bapak yang keahliannya hanya ternak kambing, ya kami belikan kambing sepasang, apabila sudah beranak boleh nanti anaknya dijual dan hasil dari menjual tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari”

Tidak hanya sampai pemberian fasilitas terhadap mustahiq, tugas UPZ juga melakukan monitoring atau pengawasan terhadap mereka yang telah menerima bantuan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan apakah fasilitas yang diberikan oleh BAZNAS benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Monitoring & pendampingan biasanya kami lakukan beberapa minggu sekali untuk mengecek para mustahiq tersebut benar-benar mempergunakan fasilitas yang kami berikan dengan baik. Kalau mereka tiba-tiba menjual fasilitas yang kami beri kan kasihan hanya dapat uang sekali saja, selanjutnya nanti mereka bingung lagi dapat pemasukan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari mana”

Selain memberikan fasilitas guna menyambung hidup, UPZ bersama BAZNAS Kota Malang juga meningkatkan bimbingan dalam aspek spiritual, misalnya memberikan motivasi dan dorongan agar mereka mampu merubah kondisi ekonomi keluarga yang semula mustahiq dan seiring berjalannya waktu mereka bisa menjadi muzaki. Seperti yang tercantum pada Al-Quran Surat Ar-Rad (13) ayat 11 sebagai berikut:

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Yang artinya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Hal tersebut diwujudkan dengan membagikan kotak infaq bagi mereka yang menerima bantuan ekonomi. Kotak infaq tersebut bertujuan untuk melatih mereka beramal, tidak peduli berapa nominalnya yang terpenting kebiasaan beramal tersebut sudah tertanam didiri masyarakat. Nantinya, hasil dari kotak infaq tersebut akan dikumpulkan dan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk bantuan yang lain.

A. Proses Penerimaan & Penyaluran Zakat Kepada Mustahiq

1. Penerimaan zakat melalui *payroll system*

Gambar 5.1 Prosedur Penerimaan Zakat Melalui *Payroll System*

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2014

Prosedur penerimaan zakat melalui *payroll system* dapat diproses melalui pemotongan zakat dalam daftar gaji ASN. Selanjutnya, zakat yang dipotong dari gaji telah disetor ke rekening BAZNAS atau menyetorkan zakat yang dipotong dari gaji ke rekening BAZNAS sesuai dengan asas bruto (100%). Lalu, pihak BAZNAS membacakan doa untuk muzakki atas zakat yang telah ditunaikan dan data pembayaran zakat direkap oleh BAZNAS guna penerbitan BSZ (Bukti Setor Zakat) yang akan dikirim kepada muzaki. BSZ dapat dibuat setahun sekali dan dikirim langsung oleh BAZNAS, tergantung kesepakatan antara pihak BAZNAS dan muzaki.

2. Penerimaan zakat melalui konter

Gambar 5.2 Prosedur Penerimaan Zakat Melalui Konter

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2014

Penerimaan zakat melalui konter dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor BAZNAS, lalu membayarkan zakat dan membuat kuitansi sesuai dengan zakat yang diterima, serta membacakan doa untuk muzaki atas zakat yang telah ditunaikan. Selanjutnya, menyetorkan zakat yang diterima ke rekening BAZNAS, selambat-lambatnya satu hari kerja setelah zakat diterima. Penyetoran dilakukan dengan asas bruto (100%). Lalu, pihak BAZNAS membacakan doa untuk muzakki atas zakat yang telah ditunaikan dan data pembayaran zakat direkap oleh BAZNAS guna penerbitan BSZ (Bukti Setor Zakat) yang akan dikirim kepada muzaki. BSZ dapat dibuat setahun sekali dan dikirim langsung oleh BAZNAS, tergantung kesepakatan antara pihak BAZNAS dan muzaki.

3. Penyaluran Zakat

Apabila di lingkungan instansi atau perusahaan wilayah tempat kedudukan UPZ terdapat mustahiq, maka pelaksanaan harian UPZ dapat membuat program pendistribusian dan pendayagunaan dengan melalui tahapan berikut:

Gambar 5.3 Prosedur Penyaluran Zakat

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2014

Prosedur penyaluran zakat kepada mustahiq melalui beberapa tahapan yaitu yang pertama UPZ mendata dan memverifikasi calon mustahiq yang ada, lalu UPZ melakukan verifikasi dan analisis serta rencana kerja dan anggaran keuangan yang dibutuhkan oleh mustahiq dan dilaporkan kepada BAZNAS untuk mendapat persetujuan. Rencana kerja penyaluran zakat dapat berupa program reguler yang disusul per 6 bulan atau program insidentil (program yang dibentuk sesuai kondisi masyarakat, biasanya dibentuk 1 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan). Setelah itu, zakat disalurkan kepada mustahiq sembari memberikan

pendampingan (khusus untuk program regular). Selanjutnya UPZ membuat laporan kegiatan dan keuangan bulanan atau kurang dari 1 bulan apabila penyaluran telah mencapai 60% dari anggaran yang sudah ditetapkan untuk program regular. Pembuatan laporan kegiatan dan keuangan bulanan selambat-lambatnya 1 bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk program insidental.

5.2 BAZNAS Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Menurut pemaparan Kementerian Agama Republik Indonesia⁴⁵, zakat memiliki fungsi dan tujuan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki Taraf Hidup

Memperbaiki taraf hidup masyarakat adalah tujuan zakat yang paling utama, karena banyak masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan. Dalam hal ini, zakat diharapkan menjadi penopang hidup masyarakat dan yang paling diutamakan adalah penyaluran zakat dalam bentuk produktif. BAZNAS Kota Malang telah menggelontorkan dana zakat yang bernilai cukup dan yang paling besar disalurkan pada bidang ekonomi atau dalam bentuk produktif kepada pedagang atau pengusaha kecil, yaitu berupa modal & alat usaha kepada pelaku UMKM yang hingga saat ini sudah ada 1.800 pelaku usaha yang mendapat pinjaman serta menjadi binaan Baznas Kota Malang. Besarnya pinjaman ini pun bervariasi, mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 5 juta. BAZNAS menyebut

⁴⁵Eko Suprayitno. Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi makro islam dan Konvensional (Graha ilmu: Yogyakarta, 2005). 44-48

bantuan tersebut sebagai bantuan modal tambahan untuk mengembangkan usaha para mustahiq. Penyaluran zakat dalam bentuk produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau lainnya yang dapat dikembangkan atau disedekahkan lagi dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup mustahik dan para mustahik akan bisa menjadi muzaki.⁴⁶ Penyaluran zakat dalam bentuk produktif, juga bisa melatih para mustahik agar bisa berusaha meningkatkan kualitas hidupnya dengan menjalani suatu proses, berbeda dengan zakat konsumtif yang sehari-harinya hanya dihabiskan untuk kebutuhan sekali pakai saja.

2. Pendidikan Beasiswa

Pendidikan merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh generasi-generasi guna kedepannya bisa membangun negara agar menjadi lebih baik. Di Kota Malang, masih banyak anak-anak putus sekolah akibat tidak adanya biaya untuk pendidikan. Hingga bulan Oktober tahun 2019⁴⁷, tercatat angka putus sekolah di satuan pendidikan sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) Kabupaten Malang setiap tahun mengalami peningkatan. Walau secara kuantitas jauh dengan angka anak sekolah yang masuk, kondisi peningkatan putus sekolah tetap wajib menjadi perhatian atau peringatan bagi Pemerintah Malang Raya.

⁴⁶ Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press

⁴⁷<https://www.malangtimes.com/baca/45701/20191030/125800/angka-putus-sekolah-naik-warning-bagi-pemkab-malang> diakses pada 5 Maret 2020

BPS mengungkapkan bahwa dari tahun 2018 hingga bulan Desember tahun 2019 Bidang Pendidikan menunjukkan, sebanyak 57,54 persen penduduk Kota Malang usia di atas 15 tahun hanya tamat SMP. Angka itu terbagi sebanyak 11,03 persen tidak mempunyai ijazah SD-sederajat, 17,16 persen tamat SD-sederajat, dan tamat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 19,35 persen di atas umur 15 tahun, serta jenjang SMA-Sederajat sebesar 36,26 persen.

Dalam hal ini BAZNAS Kota Malang telah membuat program bantuan pendidikan yang akan dibagikan kepada mereka yang putus sekolah. BAZNAS bekerja sama dengan PENDMA (Pendidikan Madrasah) Kota Malang untuk memberikan data-data siswa calon penerima bantuan pendidikan.

Tabel 5.2 Bantuan Pendidikan BAZNAS Kota Malang

KEGIATAN	NOMINAL	NAMA PENERIMA MANFAAT	ASNAF
Bantuan Dana Pendidikan dalam Rangka Hari Santri	Rp25.500.000	Kemenag	Fakir
Bantuan Dana untuk Biaya Pendidikan		Santri 53 dan 30 Pengajar	Fakir
PP Surya Buana	Rp250.000	Farras Rayhan Arrozin	Fakir
PP Surya Buana	Rp250.000	Aifka Danu Risandi	Fakir
PP Surya Buana	Rp250.000	Kautsar Lutfhian Ramad	Fakir
PP Bny Syihab	Rp250.000	Dimas	Fakir
PP Bny Syihab	Rp250.000	M Fauzi	Fakir
PP Syaifur Rifa'	Rp250.000	M Rafi	Fakir
PP Syaifur Rifa'	Rp250.000	Zumrotun Nafisah	Fakir
PP Nurul Muttaqin	Rp250.000	Ahmad	Fakir
PP Nurul Muttaqin	Rp250.000	Safira	Fakir
PPTQ Nurul Furqon	Rp250.000	Ummu	Fakir
PPTQ Nurul Furqon	Rp250.000	Izzah	Fakir
PP Assidiqqi Assyuhada	Rp250.000	Tawab	Fakir
PP Assidiqqi Assyuhada	Rp250.000	Fahri	Fakir
PPS al Mufflihun	Rp250.000	Haidar Rafid	Fakir
PPS al Mufflihun	Rp250.000	Nabban Rochmatullah	Fakir
PPTQ Raudhatussalihin	Rp250.000	Maulana	Fakir

PPTQ Raudhatussalihin	Rp250.000	Alfan Fthur Razi	Fakir
PP Darun Nun	Rp250.000	Siti Rahmatillah	Fakir
PP Darun Nun	Rp250.000	Suci Rezkika	Fakir
PP Modernt Almadinah	Rp250.000	Nurul Akmalia	Fakir
PP Modernt Almadinah	Rp250.000	Haidar Aziz	Fakir
PP Hidayatul Mubtadiin	Rp250.000	Susilo Dede	Fakir
PP Hidayatul Mubtadiin	Rp250.000	Nur Alif	Fakir
PPSS Nurul Huda Mergosono	Rp250.000	Usep Umar Fauzi	Fakir
PPS Nurul Huda Mergosono	Rp250.000	Fitri Muhammad Said	Fakir
PPM Al Kautsar	Rp250.000	Luluk Dzuriyati	Fakir
PPM Al Kautsar	Rp250.000	Mashudul Ichsan	Fakir
Pesantren Tahfidz Bani Yusuf	Rp250.000	Ervan Kurniawan	Fakir
Pesantren Tahfidz Bani Yusuf	Rp250.000	Abdul Aziz Mashuri	Fakir
PP Bahrul Maghfiroh	Rp250.000	Lutfi Hadi	Fakir
PP Bahrul Maghfiroh	Rp250.000	M. Fatian	Fakir
PP Darusallam	Rp250.000	Ainul Yaqin	Fakir
PP Darusallam	Rp250.000	Ulil Absor	Fakir
PP Anwarul Huda	Rp250.000	Jamaluddin Kamil	Fakir
PP Anwarul Huda	Rp250.000	Reihan M. Ridho	Fakir
PP Al Islam Kidul Pasar	Rp250.000	Abdul Lathif	Fakir
PP Al Islam Kidul Pasar	Rp250.000	Musthofa	Fakir
PP Sabilurosyad Garek	Rp250.000	Nurur R.A.	Fakir
PP Sabilurosyad Garek	Rp250.000	Rendi Setyo A.	Fakir
PPTQ Nurul Huda Joyosuko	Rp250.000	Wiwil Nofrizul	Fakir
PPTQ Nurul Huda Joyosuko	Rp250.000	Alfa Singgani	Fakir
Ma'had Darul Hikmah	Rp250.000	Arshinta Azahra Marsha	Fakir
Ma'had Darul Hikmah	Rp250.000	Dzia Rahmania	Fakir
Ma'had Al Madany	Rp250.000	Juan Cerwin	Fakir
Ma'had Al Madany	Rp250.000	Aqmarina	Fakir
PP Al Hayatul Islamiyah	Rp250.000	Intan Elok Habsari	Fakir
PP Al Hayatul Islamiyah	Rp250.000	Meyra Nuril	Fakir
PP Al Hayatul Islamiyah	Rp250.000	Ircham Tiok	Fakir
Ma'had Al Qolam	Rp250.000	Dea Sahila	Fakir
Ma'had Al Qolam	Rp250.000	Nizar Labib	Fakir
PP Anwarul Huda	Rp750.000	Afadhea Bintang Ramadhani	Fakir
Madin Al Istiqomah	Rp750.000	Abdul Azis Asyam (Santri)	Fakir
Madin Al Istiqomah	Rp1.000.000	Drs.H.M. Djihat Marzuki M.sy	Fakir
PP Bany Syihab	Rp350.000	Khusnul Khatimah	Fakir
PP Syai-Urrifa'	Rp350.000	A. Kholilul Rohman	Fakir
PP Nurul Muttaqin	Rp350.000	M.Alwi	Fakir

PPTQ Nurul Furqon	Rp350.000	Mochammad Nuris Fachurodhi	Fakir
PP Bahrul Maghfiroh	Rp350.000	M. Zainuri	Fakir
PP Assidiqi Assyuhada	Rp350.000	Khusniah	Fakir
PPS Al Mufflihun	Rp350.000	Dawud	Fakir
PP Muhammadiyah	Rp350.000	Fuad Maulana	Fakir
PP Muhammadiyah	Rp350.000	Aiman	Fakir
PP Modernt Almadinah	Rp350.000	Meilinda Indika Putri	Fakir
PP Modernt Almadinah	Rp350.000	Murti Muslimah	Fakir
PP Hidayatul Mubtadiin	Rp350.000	A. Maliki	Fakir
PPM Al Kautsar	Rp350.000	Amir Hamzah	Fakir
PPP Al Hikmah - AL Fathin	Rp350.000	Faiqotul Mufida	Fakir
PPTQ Raudhatussalihin	Rp350.000	A. Zainul Fatta	Fakir
PPM Surya Buana	Rp350.000	Rif'an	Fakir
PPM Surya Buana	Rp350.000	Fitri	Fakir
PP Darussalam	Rp350.000	Mundirin	Fakir
PP Anwarul Huda	Rp350.000	Putra Dwi Septian	Fakir
PP Darul Tauqid	Rp350.000	Ahmad Aula Sabiq	Fakir
PP Al Islam Kidul Pasar	Rp350.000	Nurul Aini	Fakir
PP Sabilurosyad Garek	Rp350.000	Hanafi Muhammad Sabiq	Fakir
PP Sabilurosyad Garek	Rp350.000	Miftahul Bari	Fakir
Ma'had Darul Hikmah	Rp350.000	Nurul Qibtiyah	Fakir
Ma'had Darul Hikmah	Rp350.000	Fitri Kurnia Rahim	Fakir
Ma'had Al Madany	Rp350.000	M. Muslih	Fakir
Ma'had Al Madany	Rp350.000	Lea Nur Hidayati	Fakir
PP Alhayatul Islamiyah	Rp350.000	Nisaul Muslimah	Fakir
Ma'had Al Qolam	Rp350.000	Mustahar Ali Wardana	Fakir
Ma'had Al Qolam	Rp350.000	Lailiyatus Zahra Yulia Azizah	Fakir
Bantuan Dana Biaya Pendidikan	Rp1.400.000	Adiba Mulyawati Sekar Putih	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp200.000	Nuzulia Romadona	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp200.000	Syaqila Anastasya	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp200.000	Pingkan Gresia	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp200.000	Asyera Sibbilea chayadi	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp200.000	Riski Ardiansyah	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp200.000	Naizar Fatur	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp200.000	Mohamad Fardan	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp200.000	M Adi Putra	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp200.000	Arzieta Citra Romadona	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp200.000	Ricy Vino Alfiyanto	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp300.000	Jihan Maulidia	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp300.000	Abdul Ghofur	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp300.000	M. Fakhurhuruddin Daffa P	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp300.000	Alfiyah Najwaa Salsabila	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp300.000	M . Aldi Satria	fakir

Siswa Binaan LKS	Rp300.000	Haziz Aldi Ibrahim	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp300.000	Gita Ayu Syafa Z	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp300.000	Karena Nowo Agustin	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp300.000	Alvin Halimatus S	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp300.000	Nashwa Kamila Az Zahro	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp300.000	Laela Mulyono	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp300.000	Nirmala	Fakir
Siswa Binaan LKS	Rp500.000	Faddilatun Nisa	Fakir
TOTAL	Rp58.500.000		

Dengan digelontorkannya dana bantuan untuk pendidikan tersebut, secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat dan salah satu cara yang efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui program pendidikan, diharapkan anak-anak yatim dari kalangan kurang mampu ini dapat berubah kondisi kehidupannya menjadi lebih baik.

3. Mengatasi Ketenagakerjaan atau Pengangguran

Sasaran zakat yang lain yaitu mengatasi dan menekan angka pengangguran. pengangguran merupakan suatu hal yang sampai saat belum bisa terpisahkan dari negara berkembang dan salah satu problematika yang harus di hapuskan sampai keakarnya. Pengangguran yang tidak segera diberantas akan menyebabkan kemiskinan, dan kemiskinan yang tidak segera ditangani nantinya akan berdampak pada⁴⁸: (1) tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, (3) rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, (4) menurunnya ketertiban dan ketrentaman umum

⁴⁸Karnajid & Sudarsono (Ed.). 2005. Penelitian Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Peran Serta Masyarakat Mampu Provinsi Jawa Timur. Surabaya: Lutfansah.

masyarakat, (5) menurunnya kepercayaan masyarakat pada birokrasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, (6) kemungkinan terjadinya kemerosotan mutu pada generasi yang akan datang.

Untuk mengatasi hal tersebut, BAZNAS Kota Malang menggelar pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini terselenggara berkat kerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Industri Yogyakarta yang berada dibawah naungan Kementerian Perindustrian RI. Pelatihan yang diselenggarakan selama lima hari ini selain diikuti para pengurus BAZNAS Kota Malang, juga diikuti anggota masyarakat di Kota Malang. Pelatihan ini diantaranya adalah mengelola sampah atau limbah plastic. Ada sekitar 1.013 ton limbah plastic yang dapat didaur ulang dan dijadikan sebuah usaha⁴⁹. Kewirausahaan dari limbah plastik ini akan dimanfaatkan sebagai bahan pengganti kayu pada bangunan. Dengan adanya pelatihan ini sekaligus untuk menjaga kayu-kayu yang ada di Kota Malang khususnya, agar tidak serta-merta dijadikan bahan bangunan. Peningkatan-peningkatan skill tersebutlah yang nantinya akan menjadi salah satu cara agar masyarakat bisa semakin produktif dalam memperoleh penghasilan. Dengan begitu suatu usaha atau UMKM bisa berkembang dengan berbagai macam ide yang telah dikuasai dalam pelatihan usaha

4. Program Layanan Kesehatan

⁴⁹<https://malangkota.go.id/2015/05/27/baznas-kota-malang-siap-lahirkan-wirausahawan-baru/> diakses pada 5 maret 2020

Penggunaan dana zakat dalam hal ini bisa dimasukkan dalam kategori pembagian zakat kepada kaum fi-sabilillah. Guna melaksanakan program layanan kesehatan ini BAZNAS bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS untuk memudahkan masyarakat miskin menerima bantuan dana BPJS. BAZNAS Kota Malang dalam hal ini hanya memberikan data dan membantu menyiapkan data yang dibutuhkan melalui PKK (Pendamping Kemandirian Kesehatan Masyarakat). Selain program kerja sama dengan beberapa dinas terkait, BAZNAS Kota Malang juga menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda.

Tabel 5.3 Bantuan Layanan Kesehatan BAZNAS Kota Malang

KEGIATAN	NOMINAL	NAMA PENERIMA MANFAAT	ASNAF
Bantuan Dana Santunan Kesehatan	Rp 2.500.000	M. Jaenal Pambudi	Miskin
Bantuan Dana Santunan Kesehatan	Rp 2.500.000	Rahayu Solicha	Fakir
Bantuan Dana Santunan Kesehatan	Rp 1.000.000	Marmin	Fakir
Bantuan Dana Rehab Rumah	Rp 13.000.000	M. Ismail	Fakir
Bantuan Dana Santunan Kesehatan	Rp 1.500.000	Rachmad Budiri	Miskin
Bantuan Dana Santunan Kesehatan	Rp 3.000.000	Akmad Jamroni	Miskin
Bantuan Dana Kesehatan Pengobatan Gratis	Rp 66.000.000	220 Paket dan Biaya Operasional	Miskin
Bantuan Kursi Roda	Rp 53.950.000	32 kursi roda untuk Anak YPAC	Miskin

Pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh mereka yang darurat oleh suatu keadaan, proses pelayanan kesehatan di BAZNAS lebih cepat daripada pelayanan dari pemerintah yang harus melalui beberapa proses dan kurang tepat apabila di hal tersebut sudah sangat dibutuhkan.

5. Panti Asuhan

Kepedulian kepada anak-anak terlantar seperti anak yatim tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh umat muslim. Kedudukan anak yatim Al-Quran memiliki perhatian khusus. Terdapat sejumlah 23 kali Al-Quran membahas tentang anak yatim. Semua ayat tersebut menganjur bahkan mewajibkan kaum muslim untuk menyantuni, membela dan melindungi anak yatim.⁵⁰

Pada bulan Ramadhan tahun 2019, BAZNAS Kota Malang bersama Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (BAKORWIL III) melakukan kegiatan santunan kepada 75 Anak Yatim Piatu yang bertempat di Halaman Taman Krida Budaya dikemas dalam acara Festival Ramadhan 2019. Tujuan dari santunan tersebut tidak lain perintah dari Al-Qur'an juga berniat untuk memberikan sedikit keceriaan kepada anak-anak yatim piatu. Dimana pada saat Hari Raya Nanti diharapkan mereka dapat merasakan senang dan gembira bersama dengan yang lainnya. Adapun bentuk bantuan yang diberikan berupa peralatan sekolah dan uang saku.

Tabel 5.4 Bantuan Keagamaan BAZNAS Kota Malang

KEGIATAN	NOMINAL	NAMA PENERIMA MANFAAT	ASNAF
Bantuan Dana untuk Panti Asuhan	Rp 700.000	Panti Asuhan Putra Harapan Asrori	Sabilillah
Pengajuan Pembinaan Muallaf	Rp 9.000.000	Stephany Monica Wuntu	Muallaf

⁵⁰Asep Irawati. Anak Yatim Pandangan M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah. UIN Sunan Kalijaga: 2008.

Bantuan Dana untuk Panti Asuhan	Rp 500.000	Panti Asuhan Putra Harapan Asrori	Sabilillah
Bantuan Operasional Kegiatan Pendidikan	Rp 17.900.000		Sabilillah
Bantuan Dana untuk Panti Asuhan	Rp 500.000	Panti Asuhan Putra Harapan Asrori	Sabilillah

6. Sarana Peribadatan

Peningkatan iman dan taqwa untuk menjadi manusia yang lebih baik dilakukan dengan cara beribadah. Selain itu, ketersediaan tempat ibadah yang nyaman dan bersih juga sangat diinginkan oleh masyarakat. Pada tahun 2018 lalu, BAZNAS Kota Malang menyerahkan bantuan perluasan saranaibadah di LPP Kelas II Malang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menunjang program Dakwah dan Advokasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Malang yaitu peningkatan kualitas iman dan taqwa.

Baznaz memilih LPP Kelas II Kota Malang sebagai sasaran program Dakwah dan Advokasi karena jumlah penghuninya yang semakin bertambah. Kapasitas lapas hanya sebesar 164 orang, tetapi dihuni oleh 649 orang, yang mana masjid yang digunakan apabila sholat berjamaah tidak cukup menampung jamaah dengan jumlah tersebut. Selain sholat berjamaah menjadi peraturan yang wajib dilaksanakan bagi warga lapas, pengurus lapas juga membentuk kegiatan pondok yang dikelompokkan kedalam beberapa kelas dan dilakukan selepas sholat berjamaah.

Tabel 5.5 Bantuan Sarana Peribadatan BAZNAS Kota Malang

KEGIATAN	NOMINAL	NAMA PENERIMA MANFAAT	ASNAF
Bantuan Dana Bulan Suci Ramadhan	Rp 18.600.000	Lapas Perempuan Kelas IIA	Riqob
Bantuan Dana Muallaf	Rp 7.500.000	Tumpal Halomoan Simamora	Muallaf
Bantuan untuk UPZ Masjid Al-Hidayah	Rp 10.000.000	UPZ Masjid Al-Hidayah	Sabilillah
Bantuan untuk UPZ Masjid Muritsul Jannah	Rp 10.000.000	UPZ Masjid Muritsul Jannah	Sabilillah
Bantuan untuk UPZ Masjid Al-Falah	Rp 10.000.000	UPZ Masjid Al-Falah	Sabilillah
Bantuan untuk UPZ Masjid NOOR	Rp 10.000.000	UPZ Masjid Noor	Sabilillah
Bantuan untuk UPZ Masjid Arrahman	Rp 10.000.000	UPZ Masjid Ar-Rahman	Sabilillah
Bantuan untuk UPZ Masjid Roisiyah	Rp 10.000.000	UPZ Masjid Roisiyah	Sabilillah
Bantuan untuk UPZ Masjid Sabilurrosad	Rp 10.000.000	UPZ Masjid Sabilurrosad	Sabilillah
Bantuan untuk UPZ Masjid KH. A. Dahlan	Rp 10.000.000	UPZ Masjid KH. A. Dahlan	Sabilillah
Bantuan untuk Kemenag	Rp 295.949.700	Zakat Melalui Kemenag	Miskin
Bantuan untuk Kemenag	Rp 63.312.300	Zakat Melalui Kemenag	Miskin
Bantuan untuk UPZ Masjid Ainul Yaqin	Rp 10.000.000	UPZ Masjid Ainul Yaqin	Sabilillah
Bantuan untuk UPZ Masjid Al-Halal	Rp 10.000.000	UPZ Masjid Al-Halal	Sabilillah
Bantuan Dana Pembangunan Masjid AL-Hikmah	Rp 1.500.000	Masjid Al Hikmah	Sabilillah
Bantuan Dana Kegiatan Keagamaan	Rp 10.000.000	Ponpes Al Munawawarah	Sabilillah

Bantuan Dana Pembinaan Muallaf	Rp	2.500.000	Tumpal Halomoan Simamora	Muallaf
Bantuan Dana Biaya Pendidikan	Rp	2.500.000	Windia Astutik	Fakir
Bantuan Dana Dakwah	Rp	1.500.000	Mushola Al-ikhlas Sunan Giri IX	Sabilillah
Bantuan Dana Dakwah	Rp	128.000.000	64 UPZ Masjid	Fakir
Bantuan Dana untuk Panitia Gebyar Muharram	Rp	500.000	Musabaqoh Gebyar Muharram	
Bantuan Dana untuk Panti Asuhan	Rp	700.000	Panti Asuhan Putra Harapan Asrori	Sabilillah
Pengajuan Pembinaan Muallaf	Rp	9.000.000	Stephany Monica Wuntu	Muallaf

Menurut hasil wawancara kepada beberapa *mustahik* dan pengelola program BAZNAS Kota Malang, salah satu dampak yang didapatkan oleh *mustahik* setelah mendapatkan bantuan dana ZIS yaitu Peningkatan produksi UMKM dan Kemandirian Ekonomi. Program UMKM dan Kemandirian Ekonomi merupakan program yang berpengaruh sangat besar terhadap ekonomi masyarakat. BAZNAS telah menggelontorkan dana ZIS produktif untuk pengembangan UMKM sebesar Rp. 3,5 miliar kepada 2000 UMKM dan hingga tahun 2018 perguliran omset dana produktif sudah mencapai Rp. 7,9 miliar, yang berarti dana tersebut benar-benar produktif dan berkembang dikalangan masyarakat.

Salah satu pengelolaan ZIS yaitu, dengan cara yang produktif. ZIS yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara memberikan modal usaha kepada *mustahik* dan kemudian kembangkan, digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Dengan pemberian dana ZIS diharapkan dapat

mengembangkan usaha baik meningkatkan produktivitas. Hal ini terbukti dengan data perkembangan usaha *mustahik*, antara lain:

Tabel 5.6 Mustahik penerima bantuan program UMKM & Kemandirian Ekonomi

No.	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Perkembangan
1	Fauzi	Bakso	Bertambahnya pengunjung dan peningkatan omset
2	Ida Susilowaty	Elpiji	Elpiji semakin banyak
3	Lilik Yuanis	Kerudung	Meningkatnya modal
4	Tutik Setyowati	Penjual tempura	Jenis makanan bertambah
5	Tutik Sriani	Penjual tempura	Tambah usaha jual pakaian sekolah
6	Endang S	Penjahit	Bisa tambah stok barang dagang
7	Liya W	Penjual bibit minyak wangi	Barang tambah banyak
8	Martin S	Penjual Kue basah	Ada dana cadangan untuk pesanan orang
9	Sunarsih	Penjual nasi	Bisa perbaiki tempat jualan
10	Yuli Hariyanto	Penjual nasi	Bisa menambah barang jualan

Sumber: Hasil wawancara penulis, 2020

Terlihat dari data diatas, para pedagang yang telah dibantu oleh dana ZIS dari BAZNAS dapat meningkatkan penjualannya. Lalu para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Ada juga beberapa mustahik yang bisa mendirikan usaha baru lainnya. Hal membuktikan bahwa ZIS yang didistribusikan BAZNAS Kota Malang berfungsi untuk menolong, membantu dan membina *mustahik* ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak sampai terciptalah sebuah kemandirian ekonomi.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilihat melalui table berikut ini

Tabel 5.2 Indikator Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

Indikator	Kota Malang		
	Pra Zakat (2017)	Pasca Zakat (2018)	Perubahan
P0	4.17	4.10	0,016%
P1	0,56	0,55	0,017%
I (Rp/kapita/Bulan)	454 061	507 114	11,68%
P2	0,12	0,11	0,08%

Sumber: BPS, 2018

Berdasarkan survey sample rumah tangga mustahik pada table 5.1 terlihat bahwa dana zakat dari program UMKM dan kemandirian ekonomi mampu meningkatkan dan mengembangkan usaha mustahik. Dibuktikan pada table 5.2 yang mana adanya peningkatan pendapatan sebesar 11,68% setelah disalurkan zakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai “Strategi Lembaga Zakat dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi di Kota Malang (Studi Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kota Malang), peneliti coba menggali dan mendeskripsikan strategi BAZNAS dalam mengentas kemiskinan serta dampaknya bagi masyarakat. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana oleh BAZNAS 98% didapat dari ASN.
2. BAZNAS Kota Malang berupaya mengentas kemiskinan dan menurunkan ketimpangan melalui program-program yang telah disusun oleh lembaga. Program tersebut antara lain Dakwah &Advokasi, Ekonomi, Kemanusiaan, Kesehatan dan Pendidikan.
3. Melalui program-programnya, BAZNAS Kota Malang memiliki target jangka panjang yaitu diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 1% dari data yang telah dirilis BPS dengan menggalakkan area bebas pengangguran melalui program ekonomi.
4. BAZNAS juga memiliki target jangka pendek yaitu menggelar pemeriksaan kesehatan secara gratis dan membantu menanggulangi bencana guna membantu pemerintah.
5. UPZ berperan sebagai kaki tangan BAZNAS. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan terkait serta mendata calon penerima bantuan dari BAZNAS.

6. BAZNAS telah mendistribusikan ZIS secara merata melalui 5 program di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Selain 5 program tersebut, BAZNAS juga membagikan sembako secara gratis dan berkala.
7. Penerima program bantuan dari 2 lembaga dan ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan merupakan factor yang menghambat dalam mengurangi angka kemiskinan, masyarakat tersebut bukan miskin harta tetapi miskin mental.

B. Saran

Adapun beberapa hal berkaitan dengan saran-saran yang penulis berikan kepada lembaga terkait, yaitu:

1. Bagi BAZNAS Kota Malang. Kurangnya SDM yang dimiliki merupakan salah satu factor yang menghambat kinerja lembaga, hendaknya menambah beberapa pekerja agar program berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Serta diharapkan memaksimalkan kerja sama dengan BPR Tugu Artha dalam rangka memberantas kemiskinan karena adanya praktik rentenir yang sudah menjamur dikalangan masyarakat menengah kebawah.
2. Bagi UPZ. Hendaknya meneliti dan mendata secara rinci dan lengkap terhadap calon mustahiq agar lembaga mengetahui mustahiq tersebut sudah atau belum menerima bantuan dari lembaga lain sebelumnya. Serta memaksimalkan sosialisasi dan edukasi tentang ZIS kepada masyarakat guna mereka tahu dampak ZIS terhadap masyarakat.

3. Bagi lembaga-lembaga zakat sejenis. Banyaknya lembaga zakat yang tersebar luas di Kota Malang apabila bersinergi bersama-sama memanfaatkan pemberdayaan secara maksimal terutama dibidang ekonomi, akan membantu menciptakan peluang-peluang untuk kemaslahatan umat dan kemudian akan membantu mengatasi masalah utama negara ini yaitu ketimpangan dan banyaknya pengangguran.
4. Bagi pemerintah. Perlunya peran serta masyarakat dalam membantu meningkatkan sosialisasi program zakat yang lebih aktif. Pemerintah juga diharapkan memberikan edukasi yang gencar terhadap masyarakat tentang pentingnya berzakat dan efek zakat itu sendiri bagi kelangsungan ekonomi negara.
5. Bagi praktisi dan para peneliti. Perlunya penelitian mendalam terhadap infaq dan shadaqah yang ada di Kota Malang. Karena mayoritas peneliti hanya berfokus pada zakat saja.

Penulis menyadari sebagai manusia tak terlepas dari khilaf dan kesalahan terutama selama penelitian ini dilakukan. Kritik membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca dan mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai Strategi Lembaga Zakat dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Kota Malang yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Malang. Tidak ada gading yang tak retak. Beberapa kelemahan dalam penelitian ini setidaknya bisa menjadi celah timbulnya ide-ide baru mengenai strategi suatu lembaga zakat dalam mengatasi ketimpangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, ZIS dalam Dimensi Madhab dan Sosial. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 85.
- Adelman, Irma dan Cynthia T. Morris., 1973. *Economic Growth dan Social Equity in Developing Countries*, California: Stanford University Press.
- Anis Tyas Kuncoro. 2017. ZIS: Katup Pengaman Keseimbangan Kehidupan Ekonomi Umat. *ulul albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Oktober.
- Asep Irawati. *Anak Yatim Pandangan M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*. UIN Sunan Kalijaga: 2008.
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta
BPS, 2005
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press
- Corak, Miles. (2011). *Income, Inequality, Equality, of Opportunity and Interregional Mobility*. *Journal of Economic Perspectives*. Vol 1 (1).
- Djaelani, Aunu Rofiq. 2013. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Semarang: FPTK IKIP Veteran
- Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi makro islam dan Konvensional* (Graha ilmu: Yogyakarta, 2005). 44-48
- Fred, Campano., and Dominick Salvatore. (2006) *Income Distribution*. London: Oxford University Press
- Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press
- Hasan. M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodol Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3943747/cak-imin-ketimpangan-ekonomi-bisa-jadi-bom-waktu-konflik-sosial?_ga=2.214969943.15407440.1563161324-848699344.1527161158
- <https://malangkota.go.id/2015/05/27/baznas-kota-malang-siap-lahirkan-wirusaha-baru/> diakses pada 5 maret 2020
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-strategi-pemerintah-atasi-ketimpangan-sosial/>
- <https://www.malangtimes.com/baca/45701/20191030/125800/angka-putus-sekolah-naik-warning-bagi-pemkab-malang> diakses pada 5 Maret 2020

- Kaldor, Nicholas. (1956). *Alternative Theories of Distribution*. *The Review of Economic Studies*, Vol. 23, No. 2 (1955 - 1956), pp. 83-100. Didownload dari <http://www.jstor.org/stable/2296292>, pada tanggal 21 September 2018.
- Karnajid & Sudarsono (Ed.). 2005. *Penelitian Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Peran Serta Masyarakat Mampu Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansah.
Kemendikbud, diakses pada 5 Maret 2020
- Luthfi Assyaukanie, Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer (Bandung, Pustaka hidayah, 1998, hlm 61.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mochamad Syawie. 2011. Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial. *Informasi*, Vol. 16 No. 03.
- Muhammad Niltal Muna&Meri Indri Hapsari. 2015. Implementasi Manajemen Strategik Syariah Di Bmt Amanah Ummah. *Jestt* Vol. 2 No. 12 Desember.
- Nasikun. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Niken Larasati. 2013. Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang Dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang. Universitas Airlangga.
- Ratih et al. 2015. Analisis Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Malang. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Sadono, Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Steiner & Milner. 1982. *Management Policy And Strategy*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 2
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 246.
- Taufan Adharsyah. Miris, Tingkat Kemiskinan di 6 Provinsi Ini Meningkat. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190715164211-4-85070/miris-tingkat-kemiskinan-di-6-provinsi-ini-meningkat>. Di akses pada 25 September 2019.
- Todaro M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi* (edisi kesebelas, jilid I). Jakarta : Erlangga

Usman, A H. 2015. *Manajemen Strategis Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Winarno, Surakhmad. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*. Bandung: Tarsito

www.bps.go.id

Zulfikar M S. 2014. *Kaffahisme: Ideologi Ekonomi dan Bisnis Masa Depan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

LAMPIRAN